

**IMPLEMENTASI SUSTAINABLE REGIONAL ECONOMIC  
GROWTH AND INVESTMENT PROGRAMME (SREGIP) DI  
NUSA TENGGARA BARAT**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Prodi Studi  
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

**Yulia Sasmita Hadju**

**4516023022**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI SUSTAINABLE REGIONAL ECONOMIC GROWTH AND  
INVESTMENT PROGRAMME (SREGIP) DI NUSA TENGGARA BARAT**

**Yulia Sasmita Hadju**

4516023022

Skripsi Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Zulkhair Burhan, S.Ip, MA**

Pembimbing II



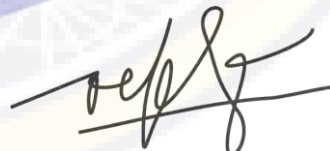
**Arief Wicaksono, S.IP., MA**

**Diketahui Oleh :**

Dekan FISIP. Universitas Bosowa      Ketua Jurusan Hubungan Internasional



**Arief Wicaksono, S.Ip, MA**



**Zulkhair Burhan, S.Ip, MA**

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari *Rabu tanggal Dua puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua puluh Satu*, dengan judul Skripsi **“IMPLEMENTASI SUSTAINABLE REGIONAL ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT PROGRAMME (SREGIP) DI NUSA TENGGARA BARAT”**

Nama : Yulia Sasmita Hadju  
 No. Stambuk : 4516023022  
 Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

### Panitia Ujian


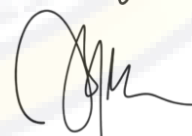


Ketua

  
**Arief Wicaksono, S.Ip, MA**

Sekretaris

  
**Zulkhair Burhan, S.Ip, MA**

### Tim Penguji Skripsi

1. **Zulkhair Burhan, S.Ip, MA** (  )
2. **Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A** (  )
3. **Arief Wicaksono, S.Ip, MA** (  )
4. **Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A** (  )

## ABSTRAK

Kesenjangan pembangunan atau ketidakmerataan pembangunan wilayah merupakan permasalahan historis setiap negara. Di Indonesia ketimpangan pembangunan terlihat jelas antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Paradiplomasi kemudian digunakan pemerintah daerah sebagai upaya kerjasama oleh GIZ (Jerman) dan Bappeda (Indonesia), proyek bantuan teknis LRED menjadikan provinsi Jawa Tengah, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah percontohan kluster industri, pertanian dan pariwisata oleh UMKM (Private Sector) yang berorientasi ekspor.

Pada implementasi program LRED periode 2011 hingga 2014 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat oleh GIZ yaitu memberikan dukungan pada privatisasi dan komersialisasi juga mendukung kemitraan usaha. Selama periode 2011-2014 laju perekonomian rata-rata di Nusa Tenggara Barat cenderung menurun pada 5,4 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,9 persen pada periode yang sama. Private Sector Development adalah bantuan luar negeri sektor swasta dengan target utamanya adalah pemberian bantuan kepada sentra produktif (enterprises and entrepreneurs). Program SREGIP menjadi salah satu upaya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional terutama di Nusa Tenggara Barat sebagai program lanjutan dari LRED dengan meningkatkan iklim investasi dengan upaya perbaikan PTSP.

Dalam upaya menumbuhkan iklim usaha yang stabil, diperlukan penerapan peraturan perundangan, yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan diperlukan sebagai inisiatif dalam usaha pengembangan ekonomi lokal (daerah), pemerintah dengan fokus utama pariwisata berkelanjutan dengan GIZ sebagai intuisi resmi Jerman dengan hibah bantuan teknis sebesar 4.400.000 Euro untuk periode 2015-2017.

Sinkronisasi program kerjasama dengan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019 berupa peningkatan keterkaitan kota-desa melalui penguatan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Secara keseluruhan bantuan Jerman sebagai pihak donor dengan karakteristik pemberian bantuan pada pengembangan ekonomi lokal berusaha menciptakan lapangan kerja yang lebih luas pada sektor terpilih, peningkatan produktivitas usaha, membentuk jaringan kemitraan antara pihak masyarakat dengan sektor swasta, serta menciptakan SDM yang berorientasi keberlanjutan.

**Kata Kunci: Bantuan Luar Negeri, Bantuan Pembangunan Resmi, Pembangunan Sektor Swasta, Pengembangan Ekonomi Lokal.**

## ABSTRAC

The development gap or inequality in regional development is a historical problem for every country. In Indonesia, the development gap is clearly visible between the western part of Indonesia and the eastern part of Indonesia. Paradiplomacy was then used by local governments as a collaborative effort by GIZ (Germany) and Bappeda (Indonesia), the LRED technical assistance project made the provinces of Central Java, Kalimantan and West Nusa Tenggara as pilot areas for industrial, agricultural and tourism clusters by SMEs (Private Sector) oriented towards export.

In the implementation of the LRED program for the period 2011 to 2014 for the West Nusa Tenggara region by GIZ, namely providing support for privatization and commercialization as well as supporting business partnerships. During the period 2011-2014 the average economic rate in West Nusa Tenggara tends to decline at 5.4 percent, lower than the national average of 5.9 percent in the same period. Private Sector Development is private sector foreign assistance with the main target of providing assistance to productive centers (enterprises and entrepreneurs). The SREGIP program is one of the efforts to achieve national development targets, especially in West Nusa Tenggara as a follow-up program from LRED by improving the investment climate by improving PTSP.

In an effort to foster a stable business climate, it is necessary to apply laws and regulations, which include aspects of funding, facilities and infrastructure, business information, partnerships, business licensing, trade promotions and institutional support are needed as initiatives in local (regional) economic development efforts. major sustainable tourism with GIZ as Germany's official intuition with a technical assistance grant of 4,400,000 Euros for the period 2015-2017.

Synchronizing the cooperation program with the development priorities of the 2015-2019 RPJMN in the form of increasing urban-rural linkages through strengthening regional economic growth centers. Overall, German assistance as a donor with the characteristics of providing assistance to local economic development seeks to create wider employment opportunities in selected sectors, increase business productivity, form a network of partnerships between the community and the private sector, and create sustainability-oriented human resources.

**Key Words: Foreign Aid, Official Development Assistance, Private Sector Development, Local Economic Development**

## KATA PENGANTAR

Segala Ungkapan Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga penyusunan skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI SUSTAINABLE REGIONAL ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT PROGRAMME (SREGIP) DI NUSA TENGGARA BARAT ini dapat diselesaikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Harapan dan do'a senantiasa penulis berikan kepada Allah SWT atas rahmat, kesehatan, kekuatan dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada penulis dan terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada didalamnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai referensi bagi pembaca dalam peningkatan ilmu pengetahuannya.

Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud dari rasa cinta, kasih sayang dan hormat kepada Ayahanda Jhon Hadju dan Ibunda Suliana, serta adinda Widya Kartika Hadju dan Alisya Safira Hadju, yang selama ini sudah memberikanku cinta, kasih sayang, semangat, inspirasi dan yang paling penting ialah limpahan do'a yang setiap hari kalian panjatkan kepada Allah SWT. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga besarku yang juga banyak memberikan bantuan dan dorongan moril, nasehat, kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Arief Wicaksono, S.IP., MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan saran, dan masukan serta bantuan yang luar biasa sehingga tersusunnya skripsi ini..
3. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., MA selaku ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar, dan sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan yang bermanfaat dan motivasi serta dorongan luar biasa yang telah diberikan untuk penulis selama pembuatan Skripsi.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar secara umum dan terkhusus pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta

para staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam seluruh pengurusan administrasi.

5. Untuk teman seperjuangan susah senang dan asam garam kehidupan Selfince Tampudu yang juga turut memberikan semangat, bantuan, informasi, dukungan yang besar selama masa perkuliahan serta dalam menyusun skripsi ini.
6. Untuk Ega Ayu Sulfihas yang juga teman seperjuangan semasa kuliah serta masa penyusunan skripsi ini dimana berkontribusi dalam memberikan hiburan tak terduga dan sebagai penyemangat saat-saat deadline.
7. Serta seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi besar dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang besar, yang tidak bisa penulis ungkapkan dan ekspresikan buat mereka yang sudah memberikan perhatian serta dukungan moril maupun materil serta doanya yang begitu mendalam sehingga penulis bisa menyelesaikan segala sesuatu sampai terwujudnya penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada almamater, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, mudah – mudahan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 28 Juli 2021





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. BATASAN MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>6</b>
1. Batasan Masalah .....	6
2. Rumusan Masalah .....	6
<b>C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>D. KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>8</b>
<b>E. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
a. Tipe Penelitian.....	18
b. Jenis dan Sumber Data.....	15

c. Teknik dan Pengumpulan Data .....	15
d. Teknik Analisis Data.....	15
<b>F. RANCANGAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
1. Penelitian Terdahulu .....	18
2. Landasan Teori.....	19
3. Alur Pemikiran.....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>37</b>
<b>A. BANTUAN LUAR NEGERI JERMAN DI INDONESIA.....</b>	<b>37</b>
1. Fokus Bantuan Luar Negeri Jerman Di Indonesia .....	37
2. Mekanisme Bantuan Luar Negeri Jerman Di Indonesia .....	38
<b>B. SUSTAINABLE REGIONAL ECONOMIC GROWTH INVESTMENT     PROGRAMME DI NTB.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
1. Investment Support Programme.....	48
2. Enabling Enviroment Support Programme .....	55
3. Privatisation and Comercialitation Programme .....	60
4. Bussines Partnership Programme.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
1. Kesimpulan.....	74
2. Saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA .....76



DAFTAR BAGAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kesenjangan pembangunan atau ketidakmerataan pembangunan wilayah merupakan permasalahan historis setiap negara. Secara global kesenjangan pembangunan dapat dilihat antara dunia belahan utara dengan negara-negara majunya dan dunia belahan selatan yang dianggap lebih tertinggal. Pada level negara dapat dilihat kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Isu ini telah menjadi fokus perbincangan internasional bahkan sejak sebelum disepakatinya program *Millennial Development Goal's* (MDGs) yang kemudian masih menjadi tujuan kepentingan bersama pada program *Sustainable Development Goal's* (SDGs)

Dalam studi ilmu hubungan internasional, konsep kepentingan nasional (*National Interest*) merupakan latar belakang yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara dalam menghadapi politik dan ekonomi global. Salah satu bentuk kerja sama internasional yaitu dibentuknya *Official Development Assistance* (ODA) atau bantuan pembangunan resmi oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Pada prinsipnya, bantuan pembangunan resmi merupakan kebijakan bantuan luar negeri yang menargetkan negara-negara berkembang dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bantuan pembangunan ekonomi, layanan kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia (OECD, 2008).

Pada perkembangannya, ODA yang saat ini dapat dikatakan sebagai promotor dalam pembangunan ekonomi dikarenakan adanya pergeseran dimana investasi swasta serta perusahaan swasta memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (World Bank, 2008). Pada kerjasama bilateral, bantuan luar negeri cenderung membangun hubungan jangka panjang dengan sektor privat (*Private Sector*) dalam bentuk pendanaan dan asistensi demi

mendukung investasi negara donor kepada sektor swasta penerima bantuan (DCED's. 2017).

Kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman sebagai mitra kerjasama prioritas yang pada tahun 2013 telah diperbaharui secara umum berkonsentrasi pada kerjasama pembangunan di tiga point prioritas yaitu energi dan perubahan iklim, pertumbuhan inklusif yang dapat menjangkau masyarakat luas serta pemerintahan yang baik dan jejaring global (GIZ, 2018). Sebagai negara transisi, Indonesia sejak tahun 2007 telah menjadi negara berpenghasilan menengah. Akan tetapi terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayahnya (GIZ, 2018). Ketimpangan pembangunan terlihat jelas antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Selama lebih dari dua decade, berbagai upaya kebijakan telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan wilayah Indonesia Timur. Mulai dari kebijakan transfer fiskal hingga berbagai program pengembangan wilayah. Akan tetapi, kesenjangan pembangunan masih menunjukkan gap yang mencolok antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Pada tahun 1993, pengembangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) diarahkan pada pulau Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Menurut evaluasi yang dilakukan Bappenas, strategi pengembangan ekonomi yang dikembangkan belum memiliki orientasi yang tepat dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam pada tiap wilayah (Bappenas, 2010). Pengaruh produktivitas menjadi penyebab utama kesenjangan ekonomi. Dalam penanganannya, meningkatkan pemerataan produktivitas, faktor kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi sangat menentukan.

Pada tahun 2007, Jerman telah mencapai kesepakatan pemberian ODA kepada Indonesia yang tertera pada "*Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany concerning Technical Cooperation in 2007*" dengan program Regional Economic Development yang disusun berdasarkan sinkronisasi tujuan ASEAN dan kebijakan Indonesia yaitu penguatan ekonomi lokal yang

kemudian menjadi *Local and Regional Economic Development (LRED)*. Fokus daerah pengembangan LRED meliputi Jepara, Surakarta dan Klaten di Jawa Tengah sebagai percontohan pada tahun 2006, kemudian dilanjutkan di 24 kabupaten di Jawa Tengah pada 2009 hingga 2011. Pada tahun 2011 LRED dilanjutkan dengan wilayah kerja di luar pulau Jawa yaitu Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat yang berakhir di tahun 2014 (Bambang, 2015).

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah di Kawasan Timur Indonesia yang masyarakatnya dapat dikatakan masih belum sejahtera. Berdasarkan otonomi daerah, wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melakukan pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya memanfaatkan potensi unggulan suatu daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian berinisiatif mengajukan proposal kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diikuti sertakan dalam program pengembangan ekonomi daerah yang kemudian terpilih menjadi model pengembangan ekonomi daerah dengan focus penembangan pada sektor industri pariwisata berkelanjutan di luar pulau Jawa.

Pemerintah daerah kemudian menggunakan paradiplomasi untuk mempromosikan potensi yang di miliki oleh suatu daerah, salah satunya pemerintah daerah kemudian menjalin kerjasama sebagai upaya memenuhi kepentingan daerahnya. Sesuai dengan konsep paradiplomasi yang memiliki beberapa bentuk implementasi aktivitas paradiplomasi seperti sister city, foreign direct investment (FDI), dan bantuan luar negeri. Dalam sebuah kerjasama yang diberikan oleh masing-masing pihak yang bekerjasama memiliki jenis bantuan yang berbeda-beda. Kerjasama yang dilakukan oleh GIZ dan NTB merupakan bentuk bantuan luar negeri berupa bantuan teknis tenaga ahli yaitu GIZ sebagai perwakilan donor Jerman selaku pihak asing dalam kerjasama internasional. Bantuan tenaga ahli yang diberikan oleh GIZ memberikan asistensi untuk membantu keterbatasan pengetahuan SDM yang dimiliki serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Kerjasama oleh GIZ dan Bappeda, proyek bantuan teknis LRED menjadikan provinsi Jawa Tengah, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah percontohan klaster industri, pertanian dan pariwisata oleh UMKM (*Private Sector*) yang berorientasi ekspor. Menurut data hasil dari Bappenas dan penelitian LRED yang dilakukan sebelumnya (Putra, 2017). Pada implementasi program LRED periode 2011 hingga 2014 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat oleh GIZ yaitu memberikan dukungan pada privatisasi dan komersialisasi juga mendukung kemitraan usaha. Kemudian sebagai mitra pelaksana, GIZ fokus melakukan promosi investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu di Nusa Tenggara Barat.

Implementasi program LRED yang merupakan program rintisan yang apabila berhasil akan menjadi standar pengembangan ekonomi daerah potensi wisata lain. Menurut data dari Bappenas, persentase keberhasilan program LRED kurang maksimal dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan diantaranya yaitu; rendahnya pemahaman tentang penjabaran pelaksanaan program oleh instansi pemerintahan itu sendiri, kemudian waktu pelaksanaan yang tidak sesuai akibat adanya keterlambatan pencairan anggaran, perbaikan konsep hingga pergantian pejabat daerah, lalu akurasi kriteria yang kurang tepat sasaran dan terbatasnya akses keragaman serta pengelolaan data dan informasi.

Selama periode 2011-2014 laju perekonomian rata-rata di Nusa Tenggara Barat cenderung menurun pada 5,4 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,9 persen pada periode yang sama. Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah NTB diukur berdasarkan PDRB per kapita pada 2011-2014 cenderung meningkat meskipun masih dibawah target rata-rata nasional sebesar 53,96 persen. Meskipun pada sektor pariwisata mengalami peningkatan kunjungan wisatawan di tiap tahunnya dengan rata-rata tamu asing dan domestik di NTB di tahun 2011-2014 sebesar 1,2 juta orang pengunjung dengan persentase peningkatan 200 persen (BAPPENAS. 2014).

Selain itu, berdasarkan penelitian lainnya oleh Erna G. Norrista, Program asistensi LRED oleh GIZ di Nusa Tenggara Barat hanya berfokus sebagai fasilitator



dan tidak merangkul semua elemen. Pada asistensi GIZ di NTB yang mana program yang dikerjakan memiliki kekurangan pada konsep keberlanjutan secara mandiri. Pada penelitian sebelumnya efektifitas program LRED di NTB untuk cakupan skala kecil dapat dirasakan secara langsung seperti untuk pengembangan ekonomi kluster Mutiara, Emas, dan Perak (MEP) Mataram dan kluster gerabah Lombok Barat. Sedangkan untuk skala lebih besar lagi tidak dapat dirasakan langsung, sehingga pada saat selesainya program asistensi maka keberlanjutan program LRED tidak dapat dilakukan dengan baik khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Setelah berakhirnya program kerja LRED di Nusa Tenggara Barat, dalam pembaharuan kerjasama bilateral melalui negosiasi antar pemerintah Indonesia dan Jerman mengenai kerjasama pembangunan pada November 2013 yang berfokus pada:

1. Energy dan perubahan iklim
2. Pertumbuhan inklusif yang dapat menjangkau masyarakat luas
3. Pemerintahan yang baik dan jejaring global

Melalui program *Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme* (SEGRIP) permasalahan keterbatasan sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, serta jaringan yang merupakan program lanjutan LRED sebelumnya dengan tujuan yang sama tetapi memiliki tiga program prioritas yang berbeda diharapkan dapat membantu mengembangkan potensi sumber daya alam yang melimpah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi daerah yang dimiliki daerah Nusa Tenggara Barat masuk pada kluster industri pariwisata dengan mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada pelaku usaha kecil. Peran sektor industri dan pariwisata pada tahun 2011-2014 (Periode LRED) kontribusi pembentukan PDRB NTB terbilang tinggi namun masih berada jauh dibawah sektor pertanian.

Maka dari itu melihat program LRED sebelumnya, bagaimana peran ODA dalam menciptakan proses pembangunan ekonomi lokal pada kerjasama yang dilakukan antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan GIZ melalui program *Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme* (SEGRIP) dengan masa kerja 2015-2017 menjadi objek yang menarik untuk dibahas.

## **B. BATASAN MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas untuk lebih memudahkan penelitian dengan pembahasan yang terarah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membatasi cakupan penelitian yang dimulai pada awal program *Sustainable Economic Growth and Investment Programme* (SREGIP) pada tahun 2015 hingga selesai pada tahun 2017.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi *Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme* (SREGIP) di Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2017 dalam mewujudkan tujuannya?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bantuan luar negeri Jerman pada pembangunan ekonomi lokal pada sektor swasta melalui program *Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme* (SREGIP) di Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2017.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep dan wawasan tentang pembangunan ekonomi lokal di sektor swasta melalui program bantuan luar negeri.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini bisa menjadi kontribusi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi serta bahan bacaan di perpustakaan dan memberikan referensi bagi mahasiswa.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi, informasi dan bekal wawasan serta pengetahuan untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama terutama penelitian yang berkait.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini berguna bagi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah dan pengembangan sektor lokal di Makassar melalui kerjasama bantuan luar negeri.

2) Bagi Masyarakat Makassar

Hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat di daerah Kota Makassar sebagai informasi dan tolok ukur perbandingan pengembangan ekonomi lokal sektor swasta berbasis pariwisata berkelanjutan.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mencari atau mengetahui secara jelas apakah bantuan luar negeri di Nusa Tenggara Timur telah terimplementasi dengan baik atau belum. Oleh karena itu, peneliti menggunakan konsep ideal tentang bantuan luar negeri (*Foreign Aid*) dan *Official Development Assistance* (ODA) untuk menganalisis implementasi program tersebut.

Bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah (donor) ke pemerintah negara lain (penerima) yang bertujuan sebagai dukungan pembangunan (Finn T, 2006). Lebih luas, menurut Lancaster bantuan luar negeri didefinisikan sebagai transfer sumber daya publik baik dari negara donor kepada negara penerima atau dari pemerintah kepada organisasi internasional atau NGO dalam rangka meningkatkan standar kehidupan bagi negara penerima. Fungsi lain dari bantuan luar negeri selain memberikan manfaat bagi negara penerima juga memiliki fungsi sebagai perluasan kerjasama hubungan diplomatik.

Bantuan luar negeri dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa kategori menyesuaikan tujuan diberikannya bantuan berdasarkan kepentingan masing-masing pihak antara negara donor kepada negara penerima atau lembaga penerima. Menurut K.J Holsti, secara umum bantuan luar negeri dikategorikan menjadi empat tipe utama yaitu pertama adalah Bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat, Bantuan Hibah (Grants), Pinjaman Pembangunan (Loan) dan terakhir yang umum digunakan adalah Bantuan Teknis (Technical Assistance).

Berdasarkan jenis bantuan luar negeri Jerman pada program SREGIP yang merupakan program lanjutan dari program LRED sebelumnya dengan tujuan meningkatkan daya saing pada daerah dan sektor terpilih. Pembangunan ekonomi menjadi dasar pemberian bantuan teknis berupa pemberian asistensi pada mitra publik dan swasta untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat daerah. Oleh karenanya peneliti kemudian menggunakan konsep bantuan luar negeri dengan pendekatan *Private Sector Development* yang dikemukakan oleh **Mads V.K dkk** sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

### 1. Bantuan Luar Negeri Sektor Swasta (*Private Sector Development*)

Liberalisasi perdagangan dunia telah mengubah kerangka kondisi pembangunan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Produksi, perdagangan, dan investasi semakin diintegrasikan ke dalam nilai global dan rantai pasokan. Pembangunan ekonomi di negara berkembang didorong oleh perusahaan kecil sektor swasta (*Private Sector Development*). Penguatan pembangunan sektor swasta yang dinamis sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang juga salah satu syarat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Lancaster, Nuamah. 2011).

*Private Sector Development* selanjutnya disingkat dengan PSD menurut OECD adalah bantuan luar negeri sektor swasta oleh komunitas donor yang bertujuan memberikan bantuan berupa prinsip organisasi dasar dalam aktivitas ekonomi. Prinsip private sektor sendiri pada dasarnya dapat diaplikasikan dalam berbagai hal termasuk pada aktivitas ekonomi seperti industry, pertanian hingga jasa. Pendekatan mendasar antara PSD dan jenis bantuan lainnya adalah target utamanya adalah pemberian bantuan kepada sentra produktif (*entrprises and Enterprenurs*) sebagai contoh yaitu UKM dan UMKM (Finn, T. 2006).

Tujuan utama PSD menurut UNDP yaitu pertama, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengelolaan *Good Government* seperti kerangka hukum dan pengaturan dalam pengembangan pasar yang bersifat netral. Kemudian yang kedua adalah memberikan bantuan dalam proses pengembangan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan terakhir, melakukan promosi peluang investasi dan model bisnis yang berkelanjutan.

Pendekatan Jerman dalam memberikan bantuan luar negeri yang melibatkan sektor swasta sebagai fokus dalam mewujudkan program SDG's melalui kerjasama pembangunan pemerintah Jerman bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perkembangan ekonomi di negara mitra. Jerman melibatkan sektor swasta dalam kebijakan pembangunan Jerman berpedoman pada prinsip ekonomi pasar sosial dan ekologis dan diarahkan pada dukungan pertumbuhan yang berpihak pada kaum miskin, inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan (Lancaster, Nuamah. 2011).

Saat ini, keunggulan kompetitif tradisional negara berkembang (upah rendah dan sumber daya alam) tidak lagi cukup dalam menghadapi persaingan internasional. Negara berkembang dan berkembang perlu membangun kekuatan baru dan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui proposisi penjualan yang unik dalam produksi dan layanan. Penawaran tersebut hanya dapat dikembangkan di sektor swasta yang dinamis, efektif dan kompetitif. Di banyak negara berkembang, usaha kecil dan menengah mencakup lebih dari 90 persen dari semua bisnis swasta. Dari pengembangan sektor swasta yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta menawarkan produk dan layanan yang inovatif. Dengan demikian, perusahaan swasta kecil dan menengah membuka jalan bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

## **2. Struktur Konsep Bantuan Private Sector Development**

Secara umum, menurut UNDP bantuan PSD dapat dipahami sebagai donor bantuan kebijakan kepada industri domestic di negara penerima. Bantuan tersebut berupa transformasi perekonomian, serta penguatan faktor kompetitif pada usaha atau bisnis sehingga menjadi pengembangan sektor produktif. Sektor swasta bertanggung jawab atas sekitar 90% pekerjaan di negara berkembang (baik pekerjaan formal maupun informal).

Pengusaha swasta dan kegiatan mencari keuntungan mereka, baik perusahaan multinasional besar, menengah dan kecil, atau petani informal menyediakan barang dan jasa penting yang meningkatkan kehidupan

masyarakat, menghasilkan pendapatan pajak dalam negeri dan merupakan kunci untuk merangsang pertumbuhan ekonomi (IFC. 2018). Di banyak negara berkembang, sektor swasta memainkan peran penting dalam memproduksi barang dan jasa untuk pasar ekspor, sehingga menghasilkan devisa (penting untuk stabilitas makroekonomi) dan memungkinkan perusahaan untuk memperluas batas produksi mereka, mencapai skala ekonomi dan meningkatkan daya saing mereka. Meskipun lembaga donor berbeda dalam pendekatan dan prioritas mereka untuk mengentaskan kemiskinan, mereka semua melihat pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengakhiri kemiskinan - dan mereka menyadari bahwa solusi pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan peran sektor swasta. Hal ini digarisbawahi oleh bukti kuat bahwa investasi swasta dan peningkatan produktivitas yang dipimpin sektor swasta merupakan kekuatan transformasional dalam pembangunan (OECD, 2006).

Iklim bisnis yang baik untuk investasi, daya saing, dan kewirausahaan merupakan prasyarat untuk meningkatkan standar hidup dan mengentaskan kemiskinan. Premis untuk menggunakan ODA untuk mempromosikan sektor swasta sangatlah mudah. Tujuan utama kerja sama pembangunan adalah pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah vektor kunci untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan - dan paling baik dicapai melalui sektor swasta. Pemerintah memiliki peran sentral yang harus dimainkan dalam memungkinkan sektor swasta untuk berkembang dan dalam memastikan bahwa pertumbuhan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Secara khusus, meskipun pembangunan sektor swasta penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan, cara sektor swasta berkembang juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola pertumbuhan. mempengaruhi apakah pertumbuhan berbasis luas atau sempit dan apakah lebih atau kurang inklusif bagi kaum miskin (OECD, 2006). Ketiga langkah strategi ini membangun fondasi ekonomi, menumbuhkan bisnis dan berinvestasi pada manusia dengan menargetkan prasyarat utama untuk mencapai pengentasan kemiskinan melalui

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dipimpin oleh sektor swasta (OECD.WTO, 2015).

Dukungan langsung bagi perusahaan swasta di negara-negara donor yang berinvestasi dalam peluang bisnis di negara berkembang merupakan fitur utama dari kegiatan sektor swasta bilateral. Umumnya pada program kemitraan mengharuskan adanya investasi jangka panjang dengan biaya dan dampak tanggungan risiko sendiri, yang bertujuan untuk menghasilkan nilai lokal, mentransfer pengetahuan dan teknologi, menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi kemiskinan. Dalam banyak kasus, proyek berfokus pada pengaturan dan / atau penguatan nilai dan rantai pasokan, peningkatan pelatihan kejuruan dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan

### 3. Instrumen bantuan Private Sector Development

**BAGAN 1. Instrumen Private Sector Development**



Sumber: Foreign Aid and Development, Finn Trap. (2000)

Upaya untuk mengatasi kesenjangan dan memaksimalkan kesempatan kerja bagi orang-orang yang tinggal di bagian bawah piramida berkembang dengan



cepat. Beberapa donor berfokus pada potensi saling menguntungkan yang tinggi untuk mempromosikan produsen, wirausahawan, dan konsumen miskin dalam mendukung pengembangan sektor swasta, dan mereka telah mengembangkan keahlian kelembagaan khusus dalam jenis inisiatif ini.

Strategi sektor swasta menurut UNDP mencakup tindakan khusus untuk mempromosikan pengembangan bisnis bottom-of-the-pyramid, termasuk advokasi untuk mendorong sektor swasta mengembangkan model bisnis inklusif untuk pasar miskin, menyediakan keuangan inovatif dan hibah untuk merangsang investasi swasta yang berkelanjutan dalam usaha yang berpihak pada kaum miskin. pengembangan, memfasilitasi integrasi produsen miskin / pelaku pasar lainnya dalam rantai nilai utama dan sektor ekonomi serta meningkatkan kebijakan dan infrastruktur kelembagaan untuk pengembangan pasar yang inklusif (Lancaster, Nuamah. 2011).

Pendekatan UNDP secara langsung memasukkan orang miskin di sisi permintaan sebagai klien dan pelanggan dan di sisi pasokan sebagai karyawan, produsen dan pemilik bisnis di berbagai titik di sepanjang rantai nilai. Instrument bantuan yang dipaparkan oleh Mads V.K dkk membagi bantuan menjadi empat bagian yaitu (Lancaster, Nuamah. 2011):

### **3.1 Investment Support Programme**

Akar dari program dukungan terhadap investasi yaitu Two Models secara teoretis memiliki keterkaitan antara tabungan domestik dan valuta asing merupakan kendala utama terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan global. bantuan PSD melalui program pemberian investasi baik secara langsung maupun transfer teknologi oleh pihak donor kepada sektor swasta di negara penerima bantuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan factor condition negara penerima.

### **3.2 Enableing Enviroment Support Programme**

Iklim bisnis yang baik untuk investasi, daya saing, dan kewirausahaan merupakan prasyarat untuk meningkatkan standar hidup dan mengentaskan kemiskinan. Premis untuk menggunakan ODA untuk mempromosikan sektor swasta sangatlah mudah. Dalam pelaksanaannya

dukungan stabilitas lingkungan bisnis lebih berfokus pada usaha kecil dan menengah dan juga program bantuan lebih mengarah pada pemberian pelatihan-pelatihan yang kemudian harus juga mendapat dukungan di level makro (pemerintah).

### **3.3 Privatisation and Commercialization Programme**

Rekonstruksi sektor public merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan berkonsentrasi pada usaha maksimalisasi pelayanan aktifitas sektor swasta merupakan tujuan dari privatisasi dan komersialisasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dari sudut pandang ekonomi agar meminimalisasi adanya monopoli.

Ada dua cara yang dilakukan oleh pihak donor dalam mendukung privatisasi dan komersialisasi. Pertama, dengan meningkatkan kegunaan infrastruktur publik dengan cara memberikan program assistansi kepada pemerintah yang berkaitan dengan sektor swasta. Yang kedua, meningkatkan nilai guna dengan cara pihak donor menyediakan dana untuk membiayai proses privatisasi dan komersialisasi.

### **3.4 Bussines Partnership Programme**

Program kemitraan usaha mengandung arti negara donor memberikan bantuan berupa modal, teknologi dan keterampilan menejerial serta akses pasar luar negeri dalam bentuk pro mosi. Ini merupakan program kemitraan yang lebih melibatkan pihak donor secara lebih luas tidak hanya sebatas sebagai pemasok barang, transfer teknologi, serta transfer pengetahuan dan keterampilan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan atau library research. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis mendapatkan bahan atau data penelitian dari buku, jurnal, artikel maupun majalah dan inter net yang memiliki hubungan dengan permasalahan diatas.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah, thesis, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dalam hal ini, penulis membaca buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian terutama terkait Sustainable Regional Economic Growth and Investment Programme di Nusa Tenggara Barat sebagai bahan referensi dalam membuat laporan penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dari lapangan. Pada penelitian ini penulis mendapatkan data melalui teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelusuran melalui buku, skripsi, artikel ilmiah, jurnal, berita dari situs internet, ataupun sumber kredibel lainnya yang relevan terkait dengan topik penelitian.

## **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif terdapat tiga aktivitas yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Bentuk analisis dalam proses pemilihan atau menggolongkan, pemusatan perhatian dan mengarahkan, atau memisah dan membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga menjadi kesimpulan akhir yang dapat diambil.

## **F. Rancangan Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini didokumentasikan dan disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan susunan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Kerangka Konseptual

E. Metode Penelitian

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

**BAB II**                    **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori

B. Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Konseptual

D. Operasionalisasi Konsep

**BAB III**                **GAMBARAN UMUM**

A. Bantuan Luar Negeri Jerman di Indonesia

1. Fokus Bantuan Jerman di Indonesia

2. Mekanisme Bantuan Jerman di Indonesia

B. Sustainable Regional Economic Growth and Investment Program

**BAB IV**                **PEMBAHASAN**

A. Investment Support Programmes

B. Enabling Environment Support Programmes

C. Privatisation and Commercialisation Programme

D. Business Partnership Programmes

**BAB V**                 **PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **B. PENELITIAN TERDAHULU**

##### **1. Bantuan luar negeri Jerman ke sektor swasta di Indonesia: implementasi program Local and Regional Economic Development di NTB tahun 2011-2014 oleh Yopa Putra Gusti**

Bantuan pemerintah Jerman dalam bentuk ODA asistensi teknis bertujuan memberikan asistensi menjalin kemitraan usaha. Dengan program-program pendukung guna meningkatkan lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata. Program LRED bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha dan membina SDM yang mampu bersaing di bidang ekspor dimana program yang dijalankan berbeda pada setiap bidang yang akan dibahas pada penelitian program SREGIP meskipun tujuan program masih memiliki acuan yang sama.

Tujuan program LRED di NTB tahun 2011-2014 yaitu berfokus pada isu good governance dengan instrumen konsep PSD dalam menjalankan asistensinya pada sektor swasta di Indonesia melalui GIZ. Jerman memberikan perhatian terhadap investasi dengan memberikan dukungan program promosi investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan stabilitas lingkungan bisnis dengan penguatan institusi dan kerangka kebijakan pasar dan teknologi serta privatisasi dan komersialisasi dengan memberikan asistensi kepada peningkatan infrastruktur dan pelayanan public.

Dalam penelitian yang dilakukan Putra, dampak program LRED secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik selain dikarenakan system pendanaan yang minim, masalah program asistensi pelatihan pengembangan SDM pada akhir program tidak ada keberlanjutan kaderisasi dimana berakhir pada saat program LRED berakhir. Begitupula penerapan kebijakan system satu pintu yang tidak berjalan dengan maksimal setelah program ini berakhir. Maka dari itu perpanjangan untuk beberapa program dilakukan hingga beberapa bulan berikutnya yaitu 2014-2015.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra Yopa adalah menggunakan konsep Bantuan Luar Negeri dengan instrument Private Sector Development (PSD) pada aktivitas technical assistance. Lebih spesifik penelitian yang dilakukan oleh Putra Yopa pada program LRED menggunakan good governance sebagai instrument bantuan luar negeri dalam pengembangan ekonomi lokal.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Bantuan Luar Negeri**

Salah satu bentuk kerjasama internasional adalah pemberian bantuan luar negeri (*Foreign Aid*). Menurut Hans Morgenthau dalam bukunya “*A political theory of foreign aid*” menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan perpindahan capital, barang dan jasa dari satu negara atau lembaga (donor) ke negara penerima (Morgenthau, 1962). Lebih jauh dalam perkembangannya, bantuan luar negeri di defenisikan sebagai transfer sumber daya oleh satu negara ke negara lain yang bertujuan mendorong pembangunan. Lebih jauh dalam perkembangannya. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya negara, masyarakat, maupun lembaga internasional yang berada pada suatu negara atau komunitas tertentu yang memberikan bantuan berupa pinjaman, hibah, nasihat teknis, teknologi, serta transfer dana kepada pihak tertentu di suatu negara (Yanuar, 2002).

Pasca Perang Dunia II, dalam upaya memenuhi kebutuhan negara salah satu instrument kebijakan politik yang digunakan adalah Bantuan Luar Negeri. Hal ini dimulai atas kesuksesan program Marshall Plan oleh Amerika Serikat dengan tujuan rehabilitasi negara-negara di Eropa pasca Perang Dunia II yang kemudian menjadi tren pemberian bantuan luar negeri dan mulai dialihkan pada pemberian bantuan luar negeri kepada negara berkembang. menurut OECD sebagai organisasi kerjasama pembangunan dan ekonomi, Foreign Aid merupakan aliran dana, bantuan-bantuan teknis dan komoditas yang dirancang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara penerima.

Dalam bantuan luar negeri terdapat berbagai jenis kategori bantuan yang dibedakan berdasarkan bentuk kerjasama bilateral yang diberikan langsung dari pemerintah (umumnya negara maju) kepada negara berkembang (Government to Government Aid) dan kerjasama multilateral yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), OECD dan lain-lain.

Dalam sejarahnya, banyak bantuan luar negeri yang telah diberikan dalam bentuk bantuan bilateral langsung dari suatu negara (Donor) kepada negara lain (Penerima). Adapun beberapa dalam bentuk multilateral (tidak langsung) dimana bantuan ini berasal dari beberapa pendonor biasanya lembaga-lembaga internasional (Radelet, 2006). Upaya ini dilakukan sebagai pemenuhan kepentingan suatu negara (National Interest) dalam bentuk kebijakan luar negeri (World Bank, 1998).

Klasifikasi bantuan luar negeri oleh Development Assistance Committee (DAC) dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pertama Official Assistance (OA) sebagai pemberian bantuan oleh negara donor kepada negara yang memiliki pendapatan perkapita dibawah 9.000 USD, kemudian Private Voluntary Assistance yaitu pemberian bantuan hibah yang berasal dari yayasan amal, Non Governmental Organisation (NGO) dan perusahaan swasta, kemudian terakhir dan yang paling sering digunakan sebagai kebijakan politik internasional adalah Official Development Assistance (ODA) sebagai kategori pemberian bantuan oleh negara donor kepada negara dengan pendapatan rendah hingga menengah (Redelet, 2006). Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe bantuan luar negeri yang diberikan untuk pembangunan ekonomi yang berupa transfer dana dan jasa yang terlegitimasi.

Bantuan luar negeri dalam pendekatan pembangunan memiliki keterkaitan dengan pembangunan ekonomi karena berorientasi pada unsur materi. Akan tetapi, pembangunan sering dikaitkan pada multidisipliner secara keseluruhan dengan pembangunan manusia, daya saing, kualitas hidup, serta kesejahteraan subjektif. Bantuan pembangunan internasional secara khusus terdiri atas lembaga dan kebijakan yang muncul pasca Perang Dunia II. Lembaga-lembaga

internasional kemudian menginisiasi tujuan untuk memberantas kemiskinan dan memperbaiki standar hidup terutama di negara-negara yang sebelumnya terjajah.

Menurut Finn Trap, bantuan luar negeri tidak hanya diberikan secara gratis namun memiliki tujuan politik dan tujuan ekonomi. Sebagai contoh tujuan diberikannya bantuan oleh pihak donor yang kemudian di banyak kasus mengharapkan adanya perubahan kebijakan di negara penerima (Trap. F, 2006). Dijelaskan pula dalam bukunya, Carol Lancaster yang berjudul *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, bantuan luar negeri merupakan transfer sukarela dari pemerintah kepada pemerintah maupun dari pemerintah kepada lembaga dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan manusia di negara penerima bantuan.

Lancaster juga menjelaskan bantuan luar negeri sebagai Tricky concept dapat diterjemahkan sebagai bantuan luar negeri sebagai kebijakan luar negeri melainkan dapat sebagai alat kebijakan negara donor. Oleh karena itu bantuan luar negeri bukan hanya sebatas transfer of resources, tetapi menjadi alat mendapatkan kepentingan sumber daya baik ekonomi maupun politik dari negara penerima bantuan. Hal ini menimbulkan azas timbal-balik baik bagi negara donor maupun negara penerima pada dasarnya mendapat keuntungan masing-masing dimana secara historis sulit ditemukan fakta bahwa bantuan diberikan atas nama kemanusiaan dan kebaikan saja (Lancaster. 2007).

Alasan pemberian bantuan luar negeri umumnya mempunyai motif *self-interest* (membawa kepentingan nasional), sebagai strategi ekonomi dan alasan moral atas nama kemanusiaan. Hal ini menimbulkan azas timbal-balik baik bagi negara donor maupun negara penerima pada dasarnya mendapat keuntungan masing-masing dimana secara historis sulit ditemukan fakta bahwa bantuan diberikan atas nama kemanusiaan dan kebaikan saja (Lancaster. 2007).

## **2. Bantuan Pembangunan Resmi (*Official Development Assistance*)**



Dua puluh tiga negara maju serta European Union bergabung di Komite Bantuan Pembangunan (DAC) OECD, dan mereka memberikan sebagian besar bantuan resmi dunia. Bantuan mereka, serta bantuan dari 20 negara lain dan semua badan bantuan multilateral utama, yang kemudian dipantau oleh OECD. Sementara OECD mengumpulkan data tentang semua aliran sumber daya untuk pembangunan termasuk investasi swasta dan filantropi, penekanan utamanya adalah pada ODA. Secara sederhana, ODA memiliki tiga karakteristik utama:

- Itu berasal dari pemerintah, baik di tingkat nasional atau negara bagian, atau dari lembaga resmi mereka;
- Ditargetkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang;
- Berbentuk hibah, atau pinjaman dengan tingkat bunga yang kurang dari suku bunga pasar.

Pada beberapa karakteristik ini, serta beberapa istilah yang muncul secara teratur dalam diskusi tentang ODA kemudian dibedakan menjadi beberapa kategori di antaranya adalah menurut K.J Holsti, bantuan luar negeri dalam bantuan pembangunan resmi mempunyai empat tipe bantuan utama yaitu:

### **2.1 Pinjaman atau hibah**

Sekitar 90% dari ODA terdiri dari hibah, dengan kata lain adalah uang yang tidak perlu dibayar kembali oleh negara berkembang. Sebagian besar sisanya merupakan pinjaman, tetapi ini bukan pinjaman yang dibebankan pada bank atau suku bunga pasar uang. Sebaliknya, ini adalah pinjaman "lunak", dikenakan tarif di bawah pasar dan seringkali dengan periode pembayaran yang lebih lama. Mungkin tampak aneh meminta negara yang relatif miskin untuk membayar kembali bantuan, tetapi pinjaman semacam itu dapat dilihat sebagai cara untuk memperkenalkan akuntabilitas dan tanggung jawab yang lebih besar ke dalam pembiayaan pembangunan. Dan jika investasi dilakukan dengan pinjaman menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, maka itu bagus untuk negara yang bersangkutan.

## **2.2 Direncanakan atau darurat**

Bantuan darurat mendapat banyak perhatian media dunia, tetapi kenyataannya sebagian besar ODA direncanakan sebelumnya dan tidak dipicu oleh keadaan darurat seperti tsunami Asia 2004 atau gempa Haiti 2010. Memang, pada tahun 2008 bantuan darurat hanya menyumbang sekitar 3% dari ODA, meskipun proporsinya telah jauh lebih tinggi pada tahun-tahun kejadian bencana alam. Pengampunan hutang: Negara-negara donor terkadang setuju untuk menunda pembayaran pinjaman atau membatalkannya sama sekali. Pembatalan dicatat sebagai “hibah” dalam ODA, meskipun, pada dasarnya, tidak ada pendanaan baru yang diberikan pada saat pinjaman tersebut diampuni. Sebagian besar pinjaman yang diberikan pada awalnya bukanlah bantuan; biasanya, misalnya, mungkin awalnya adalah kredit ekspor. Tapi pengampunan pinjaman membebaskan sumber daya untuk digunakan negara berkembang sesuai keinginan, dan dihitung sebagai ODA.

## **2.3 Bilateral atau multilateral**

ODA bersifat “bilateral” jika diberikan langsung oleh negara donor kepada masyarakat atau lembaga di negara penerima. Ini multilateral ketika diberikan kepada badan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari perspektif donor, sekitar 70% ODA bersifat bilateral dan 30% multilateral. Badan-badan tersebut memutuskan bagaimana membelanjakan uang multilateral. Tetapi mereka juga menerima uang yang "dialokasikan". Karena para donor sebagian besar memberi tahu lembaga-lembaga tersebut bagaimana menggunakan dana yang dialokasikan ini, mereka dihitung dalam bantuan bilateral. Menghitung pendanaan yang dialokasikan atau “multi-bi” ini, lembaga multilateral sebenarnya memberikan sekitar 40% dari total bantuan.

## **2.4 Kerjasama teknis**

Kerjasama teknis mengambil dua bentuk utama, yang pertama melibatkan pembayaran untuk pelatihan bagi orang-orang dari negara berkembang, baik di dalam maupun luar negeri, seringkali dengan memberikan beasiswa studi. Yang kedua, dan menjadi bentuk yang lebih banyak digunakan, melibatkan penyediaan konsultan, penasihat, guru dan administrator ke negara berkembang. Intervensi pihak luar semacam itu dapat memberikan keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan.

Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dianggap sebagai tugas etis pragmatis oleh negara-negara donor dan Organisasi Internasional (IO) yang membantu merangsang pembangunan dan memberantas kemiskinan di negara penerima bantuan (OECD, 2012). ODA juga merupakan alat pragmatis kebijakan luar negeri, namun alasan, tujuan dan maksud dari kebijakan pemerintah donor seringkali berbeda. Sejak 1999, Dana Moneter Internasional (IMF) dan 'Makalah Strategi Pengurangan Kemiskinan' (PRSP) Bank Dunia telah menjadi cara standar bagi penerima bantuan untuk mengajukan penerimaan ODA (OECD, 2013). Daftar penerima bantuan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dinilai setiap tiga tahun.

ODA sebagai aliran dana pada daftar OECD yang disediakan oleh badan resmi, termasuk pemerintah negara bagian dan lokal atau oleh badan eksekutif negara dan setiap transaksinya dikelola dengan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang sebagai tujuan utamanya. ODA bersifat konsesi dan mengandung elemen hibah sebesar 25% (dihitung dengan tingkat diskon 10% (OECD, 2010).

*Technical assistance* merupakan jenis bantuan yang digunakan dalam kerjasama Indonesia-Jerman pada program SREGIP khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kerjasama bantuan teknis melibatkan para ahli dalam merancang hingga mengimplementasikan program intervensi (transfer) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempromosikan pembangunan ekonomi. Program ini dirancang yang berkaitan dengan advokasi kebijakan pembentukan

dan peningkatan pendidikan, regulasi, keamanan tenaga kerja, serta hasil produksi (GIZ. 2018).

### **3. Pengembangan Ekonomi Lokal**

Pengembangan ekonomi Lokal (Local Economy Development) selanjutnya disebut PEL menurut World Bank merupakan proses ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah, stakeholder, dan organisasi non-pemerintah sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal (WTO, 2015). PEL bertujuan memobilisasi para pelaku sektor swasta, organisasi dan sumber daya dengan mengembangkan lembaga baru yang berbasis pada potensi dan sistem lokal melalui dialog dan tindakan strategis. Identifikasi PEL di sejumlah negara telah diakui sebagai salah satu pendekatan strategi utama dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan PEL pada beberapa negara ditujukan pada fokus mengatasi kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya daya saing ekonomi (Rahma, 2006).

Pengembangan ekonomi lokal dapat didefinisikan sebagai proses kemitraan antara pemerintah daerah, kelompok industri kecil menengah berbasis masyarakat serta sektor swasta dengan bertujuan menciptakan lapangan kerja serta merangsang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada tingkat lokal dengan menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di suatu daerah. Krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 serta reformasi politik pada dorongan demokrasi dan juga adanya kebijakan desentralisasi menjadi faktor penting pendorong penggunaan konsep PEL sebagai strategi pembangunan ekonomi alternatif.

Konsep PEL kemudian terus berkembang dan diterapkan di banyak negara di dunia karena dianggap mampu memberikan peningkatan pendapatan, daya saing ekonomi, serta lapangan kerja (UN-Habitat, 2002). Pada perkembangannya, konsep PEL dewasa ini mengalami perluasan secara dinamis dan berfokus pada lingkungan dunia usaha yang kondusif. Pengembangan tersebut diikuti oleh pengembangan teknologi dan tren pengembangan ekonomi yang diarahkan untuk merangsang usaha lokal (Private

Sector), perbaikan iklim investasi yang kompetitif, menyediakan jaringan dan kerjasama (Network), pengembangan pertumbuhan klaster-klaster ekonomi dan usaha, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat lokal (World Bank, 2015). Inilah yang menjadi perbedaan konsep PEL pada awal 1960an yang berfokus pada ketergantungan hibah, pinjaman bersubsidi, investasi bersubsidi, serta pembebasan pajak guna menarik investasi infrastruktur fisik.

#### **4. Bantuan Luar Negeri pendekatan Private Sector Development (Mads V.K, Jorgen B.M, Henrik S.M and Hans P.)**

Mads Dkk mengacu pada pengertian PSD menurut OECD adalah bantuan luar negeri sektor swasta oleh komunitas donor yang bertujuan memberikan bantuan berupa prinsip organisasi dasar dalam aktivitas ekonomi. Private ownership menjadi kunci penting dimana persaingan pasar meningkatkan produksi dan inisiatif pribadi serta tanggung jawab memberi dampak pada aktifitas ekonomi. Prinsip private sektor sendiri pada dasarnya dapat diaplikasikan dalam berbagai hal termasuk pada aktivitas ekonomi seperti industry, pertanian hingga jasa. Pendekatan mendasar antara PSD dan jenis bantuan lainnya adalah target utamanya adalah pemberian bantuan kepada sentra produktif (enterprises and Enterprenurs) sebagai contoh yaitu UKM dan UMKM (Finn, T. 2000).

Melalui pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motif pemberian bantuan luar negeri PSD adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial yang kemudian terjadi kesepakatan pemberian bantuan PSD yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi unggulan serta dapat memenuhi kebutuhan dasar negara penerima (Mads, 2000). Tujuan utama PSD menurut UNDP yaitu pertama, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengelolaan Good Government seperti kerangka hukum dan pengaturan dalam pengembangan pasar yang bersifat netral. Kemudian yang kedua adalah memberikan bantuan dalam proses pengembangan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan terakhir, melakukan promosi peluang investasi dan model bisnis yang berkelanjutan.

#### 4.1 Struktur Konsep Bantuan Private Sector Development

Dukungan langsung bagi perusahaan swasta di negara-negara donor yang berinvestasi dalam peluang bisnis di negara berkembang merupakan fitur utama dari kegiatan sektor swasta bilateral. Umumnya pada program kemitraan mengharuskan adanya investasi jangka panjang dengan biaya dan dampak tanggungan risiko sendiri, yang bertujuan untuk menghasilkan nilai lokal, mentransfer pengetahuan dan teknologi, menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi kemiskinan. Dalam banyak kasus, proyek berfokus pada pengaturan dan / atau penguatan nilai dan rantai pasokan, peningkatan pelatihan kejuruan dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Mengacu pada pengertian bantuan PSD menurut UNDP dapat dipahami sebagai donor bantuan kebijakan kepada industri domestik di negara penerima. Bantuan tersebut berupa transformasi perekonomian, serta penguatan faktor kompetitif pada usaha atau bisnis sehingga menjadi pengembangan sektor produktif. Sektor swasta bertanggung jawab atas sekitar 90% pekerjaan di negara berkembang (baik pekerjaan formal maupun informal). Kemudian oleh **Mads dkk** membaginya menjadi beberapa tingkatan level analisis isu yaitu:

- (i) Makro (Ekonomi)
- (ii) Sektor (Industri)
- (iii) Mikro (Enterprise)

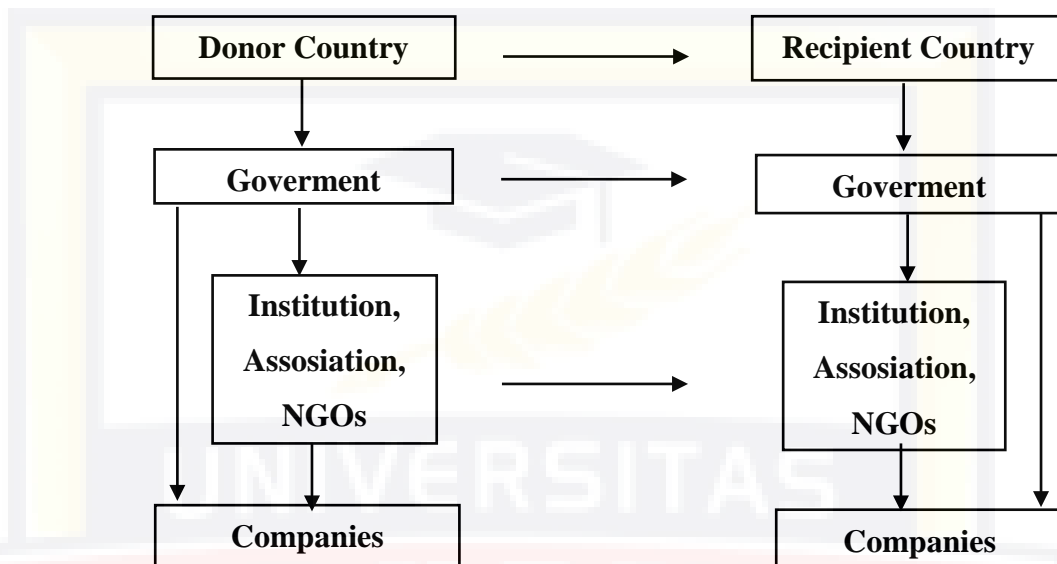
Di level makro ekonomi dibutuhkan structural adjustment programme (SAP), pada kasus di negara berkembang sektor manufaktur sering menjadi permasalahan yaitu ketidakmampuan bersaing dengan produk impor. Perlunya pemahaman PSD pada tingkatan lokal sebagai upaya lanjutan dapat dilakukan dengan liberalisasi perdagangan global baik berupa perjanjian bilateral dan multilateral. Pada bagian ini bantuan PSD akan bergerak pada stabilitasi dan structural adjustment untuk memicu efisiensi dan daya saing pada enterprise sector (Mads 2000). Pada level Sector (Industry) interventionsn dalam kerangka analisis menerapkan sistem “checklist” program bantuan yang dimulai dari factor condition, demand

condition, related sectors serta strategy structure and competition (Finn Trap, 2000).

*Industry intervention sector*, mempunyai level kerja yang berada pada tingkatan bantuan yang diberikan oleh pemerintah donor kepada sektor industry tertentu yang telah ditunjuk oleh negara penerima. Selanjutnya pada micro level interventions dalam program bantuan PSD akan membantu suatu badan usaha terbentuk, diorganisir serta diberi pelatihan teknis, pemasaran, keuangan dan pemahaman tentang analisa sumber daya, resiko-resiko dan akses sistem informasi (Finn Trap, 2000).

Berdasarkan pemahaman *level of interventions* diatas menjadi level analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. hal ini dikarenakan pemilihan sector (industry) intervention sebagai level analisis yang paling cocok untuk menganalisis program SREGIP yang diberikan oleh Jerman melalui GIZ kepada Indonesia oleh Bappenas di NTB yang berfokus pada sektor pariwisata sebagai sektor unggulan.

**Bagan 1. Prosedur Bantuan Private Sector Development**



**Sumber: Mads V.K dkk. Foreign aid and private sector**

Bantuan PSD diilustrasikan sebagai berikut: terjalannya kerjasama bilateral antara negara donor dan negara penerima, kemudian pemerintah penerima mengarahkan kepada pemerintah daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan bantuan PSD yang difokuskan pada empat bidang berbeda. Bidang pertama berada di tingkat politik berupa kebijakan, kedua peraturan sektor swasta, ketiga promosi bisnis swasta, dan terakhir penanggulangan dampak ekonomi swasta.

Dalam proses peyalurannya bantuan PSD memiliki skema pemberian bantuan kepada LSM di negara penerima. Kategori target bantuan PSD yaitu: (i) lembaga publik lokal dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan reformasi kebijakan, kedua (ii) lembaga swasta lokal seperti asosiasi, LSM, asosiasi bisnis serta kelompok level bawah dalam melatih para pengusaha, ketiga (iii) perusahaan lokal seperti investasi dan pelatihan, keempat (iv) lembaga donor, LSM, dan asosiasi sebagai manajemen proyek dan bantuan teknis dan yang terakhir (v) perusahaan negara donor yang menjalin



kemitraan langsung dengan perusahaan lokal yang melibatkan transfer teknologi, pengetahuan dan investasi.

### 3.3 Instrumen Bantuan Private Sector Development

Bantuan pembangunan sektor swasta menjadikan perusahaan sebagai penerima manfaat langsung. Intervensi dapat dilakukan di tingkat makro, sektor, atau perusahaan, dan bantuan dapat melalui berbagai saluran yang mungkin berbeda dari instrumen bantuan tradisional lainnya. Dalam hal ini, bantuan PSD mirip dengan bantuan kepada LSM. Aliran dana ke sektor swasta dapat mengambil banyak bentuk dalam perjalanan dari donor ke perusahaan swasta. Penerima manfaat dana ini terdiri dari (Finn Trap, 2000):

- (i) lembaga publik lokal, misalnya untuk pelatihan kejuruan, layanan penyuluhan dan reformasi kebijakan,
- (ii) lembaga swasta lokal, asosiasi atau LSM, seperti bank, asosiasi bisnis atau akar rumput kelompok, misalnya untuk mengorganisir, membantu dan melatih pengusaha,
- (iii) perusahaan lokal secara langsung, misalnya untuk investasi dan pelatihan,
- (iv) lembaga negara donor, misalnya untuk manajemen proyek dan bantuan teknis kepada mitra lokal mereka dan
- (v) perusahaan negara donor, misalnya kemitraan langsung dengan perusahaan lokal yang melibatkan transfer teknologi, pengetahuan dan investasi.

Berbagai saluran bantuan PSD diilustrasikan di bawah ini. Salah satu contoh aliran adalah *government-to-government-to-business* di sini adalah pemerintah daerah menerima bantuan yang kemudian diarahkan ke PSD. Dukungan tersebut dapat diarahkan pada empat bidang yang berbeda yaitu (Finn Trap, 2000):

- (i) tingkat politik (kebijakan),

- (ii) (ii) peraturan sektor swasta,
- (iii) (iii) promosi bisnis swasta dan
- (iv) (iv) pengurangan dampak negatif ekonomi pasar.

Dalam hal ini, penting untuk ditegaskan bahwa meskipun penekanannya pada sektor swasta, pemerintah memainkan peran penting. Oleh karena itu, dukungan kepada pemerintah tentang bagaimana menangani ekonomi pasar juga dapat dianggap sebagai bantuan sektor swasta. Bantuan pembangunan sektor swasta tidak selalu setara dengan perampangan, melainkan mendefinisikan ulang, sektor publik

Pada level of intervention yang dijabarkan oleh Mads dkk terdapat empat instrument yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bantuan PSD. Dari keempat pembagian instrumen yang di kemukakan oleh Mads dkk kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

**a) Investment support programmes**

Bantuan PSD program investasi yaitu adanya pemberian investasi langsung atau transfer teknologi yang dilakukan oleh lembaga donor ke private sector di negara penerima melalui pemberian pelatihan serta studi teknis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan faktor kondisi negara penerima.

Pada aspek pembangunan selain digunakan sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa sebagian dana yang dicadangkan untuk instrumen pendukung investasi terutama difokuskan untuk membantu perusahaan-perusahaan di negara-negara donor dalam upaya internasionalisasi mereka.

Pihak pemberi dana memiliki dua tujuan yaitu pengembalian investasi dan pembangunan ekonomi di negara penerima. Tujuan tambahan untuk transfer dana yang berbasis di negara-negara donor adalah untuk mendukung perusahaan nasional dalam proses

internasionalisasi mereka dalam hal ini membentuk akses jaringan bisnis yang lebih luas baik secara domestic maupun internasional.

Dalam beberapa kasus, hibah diberikan dalam bentuk pelatihan atau fasilitas lingkungan yang terkait dengan dana tersebut. Beberapa pihak dan lembaga donor juga mendanai studi kelayakan dan teknis. Kecenderungannya adalah untuk memberikan dukungan pada fase implementasi daripada pada fase persiapan.

**b) Enabling environment support programme**

Iklim bisnis yang stabil merupakan faktor pendukung pada level makro serta level sektor. Pada level makro meningkatkan stabilitas lingkungan bisnis merupakan kebutuhan dasar dengan penyesuaian liberalisasi dan deregulasi yang kemudian akan secara alami memberi dampak positif di level sektor dalam keberlangsungan *Private Enterprises*.

Kebijakan industri atau bisnis menjadi objek yang mempengaruhi iklim yang mendukung hal-hal mengenai aturan, peraturan, informasi, infrastruktur fisik dan keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan sumber daya lainnya, yang dibuat di luar perusahaan tetapi memengaruhi operasi di dalam perusahaan.

Pada pihak donor bilateral memiliki tanggung jawab untuk mendukung lingkungan di mana perusahaan swasta beroperasi. Sebagian besar dari dukungan ini diarahkan pada sektor usaha kecil dan menengah, seringkali dalam bentuk pelatihan kejuruan dan program kredit. Dukungan terhadap lingkungan yang mendukung dapat diselenggarakan di sektor publik, sektor swasta (perusahaan, asosiasi bisnis atau entitas lain) atau dalam kemitraan di antara keduanya. Administrasi publik dapat ditargetkan dengan dukungan untuk memperbaiki sistem legislatif, Organisasi swasta juga memainkan peran baru dalam ekonomi pasar dan dapat ditargetkan dengan dukungan donor untuk lebih memahami dan mengisi peran ini. Organisasi ini dapat berupa asosiasi bisnis, organisasi pendukung bisnis swasta,

lembaga pasar atau organisasi untuk promosi ekspor, investasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi, dll.

Bank Dunia dalam membentuk kelompok lingkungan bisnis, yang membantu negara-negara dalam merancang dan menerapkan strategi dan reformasi individu untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong daya saing sektor swasta. Departemen PSD Bank Dunia ini kemudian menerapkan empat bidang yang memiliki keterkaitan antara lain (Finn Trap, 2000):

- (i) Institusi dan kebijakan kerangka pasar,
- (ii) Pembangunan konsensus: kemitraan swasta-publik,
- (iii) Pengembangan ekspor dan hubungan eksternal dan
- (iv) Pelatihan dan akses teknologi

**c) Privatisation and commercialization programmes**

Rekonstruksi sektor publik merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan berkonsentrasi pada usaha maksimalisasi pelayanan aktifitas sektor swasta merupakan tujuan dari privatisasi dan komersialisasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dari sudut pandang ekonomi agar meminimalisasi adanya monopoli.

Dalam beberapa decade terakhir upaya privatisasi telah terjadi di semua sektor ekonomi dan negara berkembang. Privatisasi seringkali merupakan bagian dari program reformasi ekonomi yang lebih besar.

Di banyak kasus, lembaga keuangan menjadi lembaga terkemuka dalam persiapan dan dukungan program privatisasi, memberikan saran dan pinjaman untuk menutupi biaya yang terkait dengan privatisasi, dan juga memberikan pinjaman investasi untuk membantu merestrukturisasi perusahaan yang diprivatisasi. Ini juga mendukung dalam fase pasca-privatisasi dengan membantu pemerintah untuk menyiapkan kerangka kerja fasilitasi dan peraturan untuk sektor yang diprivatisasi, dengan membantu sektor perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi

baru, dan dengan membantu sektor keuangan untuk menangani perusahaan swasta baru.

Banyak donor bilateral telah mendukung proses privatisasi dan komersialisasi dengan berbagai cara. Bantuan asing tradisional sering diarahkan ke infrastruktur dan utilitas publik, untuk mempersiapkan mereka untuk privatisasi atau setidaknya komersialisasi. Donor juga telah berkontribusi untuk menutupi pengeluaran dan menghapus utang dalam proses privatisasi. Pertukaran utang-untuk-ekuitas telah difasilitasi oleh dana donor, dan kadang-kadang donor telah menyediakan dana untuk membiayai privatisasi. Donor bilateral juga telah mendukung pemerintah secara langsung dalam proses privatisasi.

#### **d) Business partnership programme**

Program kemitraan pada dasarnya tidak hanya sebatas negara donor sebagai pemasok kebutuhan ataupun transfer pengetahuan dan teknologi melainkan negara donor dapat membuka pasar global yang lebih luas melalui jaringan pasar global mereka. Dalam prakteknya perusahaan donor akan melakukan kemitraan usaha seperti penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, pengembangan SDM melalui pelatihan yang bergerak dibidang ekspor, penyuluhan keselamatan kerja dan kesetaraan gender.

Lembaga donor dalam persiapan dan dukungan program privatisasi, memberikan saran dan pinjaman untuk menutupi biaya yang terkait dengan privatisasi, dan juga memberikan pinjaman investasi untuk membantu merestrukturisasi perusahaan yang diprivatisasi. termasuk mendukung dalam fase pasca-privatisasi dengan membantu pemerintah untuk menyiapkan kerangka kerja fasilitasi dan peraturan untuk sektor yang diprivatisasi, dengan membantu sektor perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan dengan membantu sektor keuangan untuk menangani perusahaan swasta baru.

Banyak donor bilateral telah mendukung proses privatisasi dan komersialisasi dengan berbagai cara. Bantuan asing atau dalam hal ini bantuan donor tradisional sering diarahkan ke infrastruktur dan utilitas publik, untuk mempersiapkan mereka untuk privatisasi atau setidaknya komersialisasi. Donor juga memberikan berkontribusi untuk menutupi pengeluaran dan menghapus utang dalam proses privatisasi. Pertukaran utang untuk ekuitas difasilitasi oleh dana donor, dan dalam beberapa kasus pihak donor menyediakan dana secara khusus untuk membiayai privatisasi. Donor bilateral juga telah mendukung pemerintah secara langsung dalam proses privatisasi.

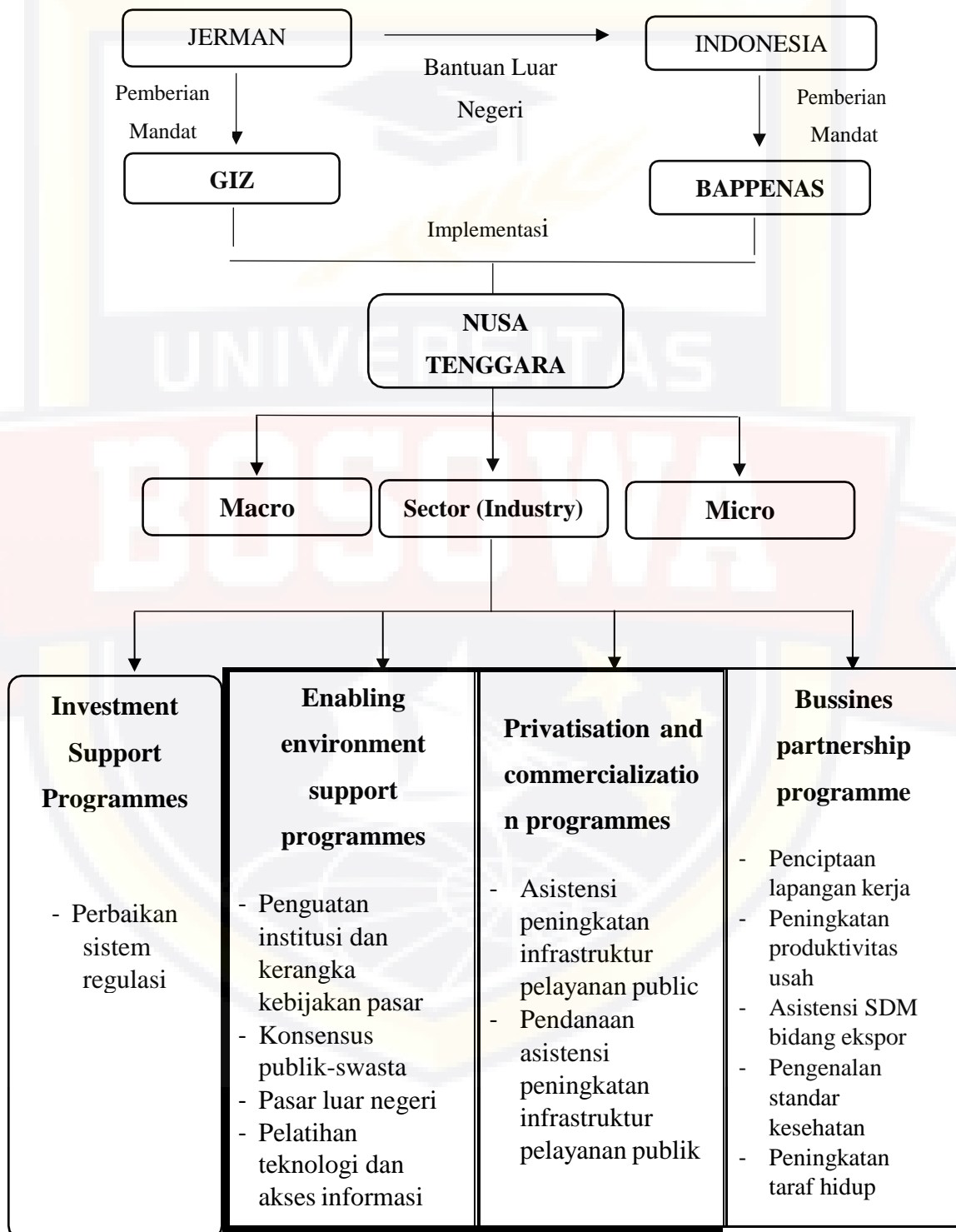
UNIVERSITAS

**BOSOWA**



### C. Alur Pemikiran

Bagan 2. Bantuan Luar Negeri Jerman Lokal di Indonesia  
(Implementasi Program SREGIP di NTB tahun 2015-2017)



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. BANTUAN LUAR NEGERI JERMAN DI INDONESIA**

##### **1. Fokus Bantuan Luar Negeri Jerman di Indonesia**

Secara resmi pada tahun 1952 hubungan diplomatik Indonesia - Jerman dibuka yang juga merupakan hubungan persahabatan terlama Jerman dengan negara diluar Eropa yang telah dimulai sejak abad ke-15 (Kemenlu, 2016). Indonesia dan Jerman memiliki pondasi kuat dalam geopolitik kawasan yang memiliki peran penting dan nilai strategis dalam masing-masing kawasan. Jerman merupakan negara salah satu pendiri UE, memiliki stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Di Asia tenggara Indonesia memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang baik dengan lokasi strategis di dunia serta salah satu pendiri ASEAN.

Secara politik, Jerman secara konsisten mendukung stabilitas serta integrasi wilayah dan upaya penyelesaian konflik serta dialog dan negosiasi. Selain itu, komitmen Jerman dalam membina kerjasama ekonomi dan perdagangan yang dilakukan melalui ekspor-impor dan kegiatan investasi di Indonesia serta kerjasama teknis sains dan teknologi di Indonesia (BKPM, 2015). Potensi Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam terutama mineral seperti gas bumi, batubara, timah, nikel serta emas. Kemudian sumber daya laut dan hutan dan rempah-rempah. Jumlah populasi penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa memiliki potensi pasar yang besar.

Dalam komitmennya, Jerman menunjukkannya melalui kerjasama pembangunan termasuk pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama keuangan (*loan dan grant*) dan kerjasama teknis yang diajukan Indonesia berdasarkan fokus kebijakan luar negeri Jerman. Berdasarkan kesepakatan kerjasama bilateral dalam "*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of*



*Germany concering Technical Cooperation in 2007*” pihak Jerman yang diwakili oleh kementerian kerjasama pembangunan dan ekonomi (BMZ) dan Indonesia diwakili oleh BAPPENAS bersama kementerian terkait menghasilkan kesepakatan kerjasama yang difokuskan pada isu pengembangan sektor swasta, tata kelola pemerintahan yang baik dan perubahan iklim dimana salah satu implementasi dari isu pengembangan sektor swasta yaitu *Sustainable Economic Growth and Investment Programme* (SREGIP) tahun 2015 hingga 2017.

Pada pengembangan sektor swasta yang memiliki tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan perluasan lapangan kerja. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut, strategi yang digunakan sebagai berikut (diplo, 2016):

1. Pembekalan lulusan sekolah sesuai keahlian yang dibutuhkan pasar.
2. Pelatihan keahlian sekolah kejuruan.
3. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan penentuan strategi bisnis.
4. Peningkatan produktivitas ekonomi dengan memperkuat jaringan UMKM serta perbaikan iklim usaha dan investasi.
5. Memfasilitasi stakeholder dalam rumusan kebijakan.
6. Memfasilitasi penyusunan mekanisme perlindungan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Selanjutnya, pemerintah Jerman dalam mendukung mitranya (Indonesia) pada pengembangan ekonomi regional sektor swasta melalui integrasi instrument program LRED dengan upaya kepemilikan dan keberlanjutan penggunaan instrument. Terakhir, dukungan pembangunan ekonomi regional dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif yang berdampak pada peningkatan bisnis dan daya saing pada sektor-sektor yang telah terpilih dengan program-program yang telah disepakati.

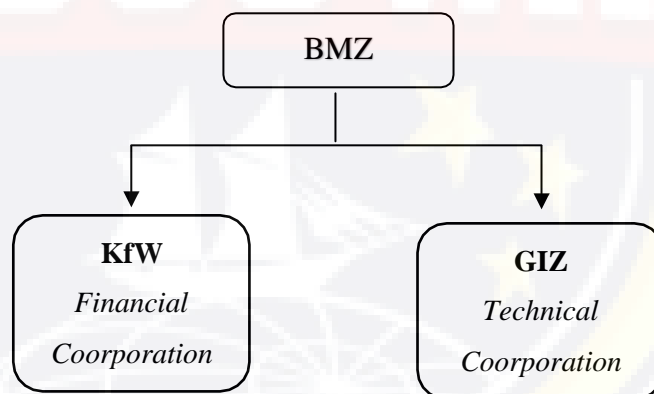
## **2. Mekanisme Bantuan Jerman di Indonesia**

Berdasarkan fokus kerjasama luar negeri Jerman, kegiatan ODA Jerman dikelola terpusat oleh Kementerian Kerjasama Ekonomi dan

Pembangunan atau BMZ (*Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung*) dan dibantu oleh sejumlah organisasi pelaksana yaitu *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH adalah perusahaan federal yang membantu Pemerintah Jerman dalam bidang kerjasama internasional dalam bidang kerjasama teknik.

Kemudian selanjutnya KfW (*kreditanstalt für Wiederaufbau*) atau bank pembangunan Jerman yang bertugas mendanai investasi dan pendamping layanan konsultasi di negara-negara berkembang. Melalui lembaga KfW Jerman bertujuan mencapai cita-cita perbaikan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dengan berfokus pada mengurangi kemiskinan, pelestarian sumber daya alam serta perdamaian. Struktur koordinasi ini merupakan hasil dari penyederhanaan lembaga pelaksana bantuan oleh Jerman yang diubah sejak 1 Januari 2011.

### **Bagan 2. Struktur lembaga ODA Jerman**



**Sumber: Bappenas, 2016**

### **B. Sustainable Regional Economic Growth and Investment Program di NTB**

Program pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah berkelanjutan atau SREGIP pada dasarnya merupakan program lanjutan dari LRED 2011-2014 di NTB yang juga program terusan *Regional Economic Development*

(RED) tahun 2004-2014 yang dilakukan di beberapa daerah di pulau Jawa. Program ini merupakan salah satu fokus program kerjasama Indonesia-Jerman yang diintergrasikan sebagai pendukung pengembangan ekonomi lokal sektor swasta.

Program SREGIP di NTB dilaksanakan dengan berfokus pada pengembangan sektor pariwisata melalui produsen kecil dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada daerah fokus pelaksanaan berada di wilayah pulau Lombok. Pengembangan ekonomi lokal kemudian bermitra pada aktor sektor public dan swasta guna meningkatkan daya saing petani kecil dan UKM dengan memberikan mereka koneksi ke rantai pasokan nasional dan internasional agar memberikan citra iklim politik yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **1. Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan 2015-2019**

Rencana induk pariwisata berkelanjutan NTB selanjutnya disebut RIPARDA atau Sustainable Tourism Master Plan (STMP) disusun sebagai dokumen strategis perencanaan praktis panduan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kebijakan ini difokuskan kepada kebutuhan pemangku kepentingan sebagai arahan dalam mengambil keputusan dan pengembangan strategi program aksi untuk dilaksanakan dalam mewujudkan destinasi berkelanjutan.

Penyusunan RIPARDA mengacu pada kriteria global dalam membangun *sustainable tourism* berdasarkan garis besar yang telah ditetapkan oleh Global Sustainable Tourism Commite (GTSC) dibawah kode etik global United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) dengan tujuan utama STMP yaitu (RIPARDA, 2015):

- Untuk membangun dan menuangkan sasaran dan arahan pada sektor industry, masyarakat dan pemerintah.
- Untuk mengembangkan strategi dalam mencapai sasaran dan menentukan peran masing-masing institusi.
- Menyediakan asar dalam menentukan prioritas penerapan yang strategis.

- Menyediakan kerangka kerja yang disetujui bersama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan jangka panjang.

Penyusunan RIPARDA melalui kerjasama antara Kementerian Pariwisata, GIZ dan GTSC. Inisiatif ini kemudian disambut baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi daerah pilot atau percontohan pengembangan destinasi keberlanjutan (RIPARDA, 2015).

## **2. Dampak Pengembangan Yang Diharapkan dari Program SREGIP**

Dalam pelaksanaan asistensi program SREGIP di NTB, dilaksanakan berdasarkan panduan kesepakatan kerjasama yaitu pertama terlibat aktif dalam kemitraan dengan sektor swasta yang menghubungkan antara petani dan produsen kecil dalam jaringan pasar domestik dan internasional. Kedua memberikan asistensi pelatihan kepada pelaku mitra berupa pemberian standar prosedur, materi lokakarya dan modul pelatihan. Terakhir, kemitraan yang terjalin antara seluruh lapisan pemerintahan bertujuan menciptakan kondisi iklim pemerintahan yang baik (Good Government) sehingga mitra publik dan swasta dapat berjalan dengan baik dan di implementasikan dalam strategi pembangunan nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Dampak pengembangan yang diharapkan:

- a) Dampak Ekonomi
  - Memberikan manfaat ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui keuntungan usaha dan kesempatan kerja.
  - Menciptakan pasar untuk produk wisata yang telah disiapkan.
  - Membangun jejaring antar sektor terkait.
- b) Dampak sosial
  - Meningkatkan kualitas SDM lokal melalui program pelatihan dan pendidikan.
  - Mendukung pembentukan organisasi masyarakat lokal.
  - Meningkatkan tata kelola kepariwisataan melalui keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

c) Dampak Lingkungan

- Memperbaiki infrastruktur
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal
- Meningkatkan standar kesehatan melalui perbaikan sanitasi dan sistem pengelolaan limbah, fasilitas umum dan infrastruktur (air, listrik dan telekomunikasi).
- Mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan



## BAB IV

### IMPLEMENTASI SUSTAINABLE REGIONAL ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT PROGRAMME (SREGIP) DI NUSA TENGGARA BARAT

Besarnya sumber daya alam yang dimiliki NTB seyogyanya harus berimbang pada perekonomian kesejahteraan rakyat. Upaya pembangunan ekonomi lokal salah satunya adalah pengembangan usaha menengah dan kecil (UMKM) yang mempunyai peran vital dalam pembangunan ekonomi. Dalam pengembangan UMKM ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kualitas SDM di bidang UMKM masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal yang masih rendah, modal usaha yang belum tersedia, kurangnya regulasi kebijakan yang mengatur pengembangan sektor UMKM serta strategi pemasaran yang masih konvensional dan terbatas.

Program SREGIP menjadi salah satu upaya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional terutama di Nusa Tenggara Barat. Para pemangku kepentingan kemudian menerapkan asas keberlanjutan pada pengembangan pariwisata di Lombok yang kemudian tidak hanya tentang *Hard Infrastructure* seperti fasilitas dan aksesibilitas, tetapi juga tentang *Soft Infrastructure* seperti kesadaran masyarakat untuk menerapkan pariwisata keberlanjutan. Dengan demikian, jaringan multi-stakeholder diperlukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Proyek SREGIP merupakan program lanjutan dari program LRED NTB yang dilakukan pada tahun 2009 hingga 2014 sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal melalui meningkatkan iklim investasi dengan upaya perbaikan PTSP. Tujuan proyek SREGIP adalah meningkatkan daya saing daerah terutama daerah pilot Kalimantan Barat dan NTB melalui peningkatan nilai tambah serta pemerataan dan berwawasan lingkungan. Ruang lingkup proyek SREGIP adalah sebagai berikut:

- (1). Pemberian bantuan teknis dan fasilitator dalam penyusunan kebijakan peningkatan investasi daerah
- (2). Sebagai fasilitator UMKM dan koperasi
- (3). Kerja sama antar daerah dan pemangku kepentingan
- (4). Penerapan inovasi dan teknologi dalam rangka peningkatan nilai tambah
- (5). Asistensi dalam penyusunan regulasi sebagai upaya mendukung penguatan iklim dunia usaha.

Dalam upaya menumbuhkan iklim usaha yang stabil, diperlukan penerapan peraturan perundangan, yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan diperlukan sebagai inisiatif dalam usaha pengembangan ekonomi lokal (daerah), pemerintah daerah NTB kemudian mengajukan kerjasama pengembangan ekonomi lokal dengan fokus utama pariwisata berkelanjutan dengan GIZ sebagai intuisi resmi Jerman dengan hibah bantuan teknis sebesar 4.400.00 Euro untuk periode 2015-2017. Sinkronisasi program kerjasama dengan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019 berupa peningkatan keterkaitan kota- desa melalui penguatan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dengan susunan sebagai berikut (SREGIP, 2017):

- a. Prioritas Pembangunan
  - Peningkatan PSTP di daerah serta kemudahan investasi
  - Pengembangan kerjasama antardesa, daerah dan pemerintah swasta
  - Memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi
  - Penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
- b. Area intervensi utama SREGIP
  - Dukungan kebijakan
  - Peningkatan kapasitas dan tata kelola
  - Peningkatan kerjasama

- Pengembangan inovasi dan teknologi

Pada bab pembahasan, akan menjelaskan tentang konsep bantuan luar negeri menggunakan instrument pendekatan *Private Sector Development* dalam program SREGIP di Nusa Tenggara Barat sebagai bantuan luar negeri Jerman pada sektor swasta di Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi lokal di sektor swasta dikelompokkan menjadi empat instrument antara lain *Investment Support Programmes, Enabling Environment Support Programmes, Privatization and Commercialisation Programmes*, dan yang terakhir *Business Partnership Programmes*.

Pertama, instrument *Investment Support Programmes* dalam bantuan luar negeri Jerman di sektor swasta menjabarkan proses asistensi oleh negara donor. Dalam program SREGIP yaitu penguatan peran jaringan multi-stakeholder dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di NTB khususnya Lombok baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam proses perencanaan, jaringan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk pengembangan visi pariwisata berkelanjutan yang selanjutnya dituangkan dalam masterplan pariwisata berkelanjutan termasuk sinkronisasi program serta anggaran. Dukungan tersebut dapat berupa studi teknis dan pelatihan.

Selanjutnya, instrument *Enabling Environment Support Programme* yaitu instrument yang menjabarkan pemberian dukungan penguatan instuisi serta kerangka kebijakan di Nusa Tenggara Barat. Secara umum, jaringan multi-stakeholder GIZ selaku agen asistensi perwakilan Jerman sebagai intuisi yang telah mapan membentuk konsensus antara pihak publik dan swasta untuk mendukung pengembangan pasar domestik dan luar negeri seperti pelatihan dan akses teknologi kepada Mitra termasuk pengenalan teknologi baru sebagai pendukung dalam membantu mengelola pariwisata berkelanjutan.

Instrument *Privatization and Commercialisation Programmes*, dengan GIZ sebagai agen donor perwakilan Jerman berperan sebagai multi-stakeholder yang berperan sebagai intuisi perencanaan dan pengawas untuk mendukung peningkatan



infrastruktur pelayanan publik yang memberikan asistensi pengarahannya peran pemerintah terhadap layanan kepada sektor swasta guna menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Instrument terakhir dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu *Business Partnership Programme*, sebagai pihak donor perwakilan Jerman dalam memberikan bantuan adalah menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dalam mengikuti standar perkembangan ekonomi global.

Dalam Implementasi SREGIP diwujudkan dalam Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Lombok (*Sustainable Tourism Master Plan*) yang didukung dengan Rencana Aksi (STMP-AP) dalam RIPPARDA dengan strategi inti adalah “Membangun destinasi pariwisata yang unik, bersih, autentik, dan berkelanjutan”. Berikut adalah strategi rencana induk pariwisata berkelanjutan di Lombok Nusa Tenggara Barat (adoc, 2017):

- Memeriksa secara menyeluruh dampak lingkungan dalam satu tujuan pariwisata.

Fokus wilayah: Gili Trawangan

- Mengembangkan dan menegakkan peraturan lokal (awig-awig) di daerah wisata inti.

Fokus wilayah: Rinjani dan sekitarnya (Senaru, Bayan, Sembalun) dan tiga Gili (Trawangan, Meno, Air)

- Mengembangkan infrastruktur pariwisata berskala kecil yang diatur oleh masyarakat lokal.

Fokus wilayah: Rute trekking Rinjani, Banyumelek, Sesaot, Suranadi

- Mengidentifikasi pengembangan potensi pariwisata maritim.
- Mengembangkan langkah-langkah adaptasi bagi perubahan iklim.

Tujuan jangka panjang pariwisata berkelanjutan di Lombok adalah untuk menciptakan Lombok sebagai *Role Mode* destinasi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat di replikasi dan di adaptasi di daerah lain di Indonesia.

Berikut adalah program Inisiatif Pariwisata Berkelanjutan dari Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan dalam program SREGIP (Bappenas, 2017):

- Kemitraan jaringan antara Hotel dan penyedia jasa dan pemasok barang pada tingkat lokal.
- Program pariwisata Desa Hijau
- Program efisiensi sumber daya
- Promosi dan pemasaran
- Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Forum Pemangku Kepentingan Pariwisata Daerah

Perkembangan industri pariwisata tumbuh menjadi sektor yang menjanjikan dalam pengembangan perekonomian global. Jumlah kunjungan wisatawan internasional secara eksponensial meningkat dari 25 juta pada tahun 1950 menjadi 1,1 Milyar di tahun 2014 (UNWTO, 2015). Kontribusi langsung pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto PDB tumbuh signifikan yang diikuti oleh pertumbuhan pendapatan ekspor serta lapangan pekerjaan (UNWTO, 2015).

Perkembangan industri pariwisata yang signifikan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif seperti hilangnya habitat flora dan fauna terutama yang terancam punah, pencemaran lingkungan, serta hilangnya identitas masyarakat lokal yang mengadopsi gaya hidup wisatawan akibat eksploitasi yang berlebihan dan mengesampingkan dampak keberlanjutan.

Pergeseran paradigma ini menyebabkan dilakukannya upaya pariwisata berkelanjutan yang dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan yang mempromosikan konservasi alam, keterlibatan masyarakat lokal serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di daerah tujuan wisata. Pariwisata berkelanjutan memperhitungkan keterkaitan antara dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang (world travel & tourism council, 2014). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata

berkelanjutan meningkatkan daya saing destinasi wisata yang mengarah pada pembangunan ekonomi daerah. Upaya yang dilakukan untuk mendukung ialah pengembangan investasi daerah yang berkelanjutan dengan intervensi GIZ selaku pemangku kepentingan eksternal ialah pada realisasi investment promotion, kemudahan izin usaha dan penguatan PTSP. Hal tersebut menjadikan pariwisata berkelanjutan diadopsi sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) pada tahun 2030.

### **1. Investment Support Programmes**

Penjabaran instrument *Investment Support Programmes* oleh pihak donor dalam program SREGIP ialah penguatan peran jaringan multi-stakeholder dalam penguatan baik dalam perencanaan serta pengelolaan pariwisata berkelanjutan di NTB. Dalam pelaksanaan asistensinya, GIZ sebagai mitra pelaksana menerapkan pendekatan holistik yang melibatkan multi-stakeholder yang harus ditangani dengan melakukan kolaborasi oleh para pemangku kepentingan mulai dari para ahli, pemerintah, masyarakat lokal, operator pariwisata hingga wisatawan.

Bantuan PSD melalui program pemberian investasi baik secara langsung maupun transfer teknologi oleh pihak donor kepada sektor swasta di negara penerima bantuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan *factor condition* negara penerima. *Factor condition* yang dimaksud meliputi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan modal fisik (*Physical Capital*), peningkatan modal serta perbaikan infrastruktur pelayanan public (Mads, 2001). Akan tetapi dalam implementasinya tidak semua hal dapat dilaksanakan.

Pertumbuhan pariwisata di NTB mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya berdasarkan data sejumlah penelusuran Badan Pusat Statistik NTB pada akhir tahun 2015 potensi pariwisata NTB sebagai potensi unggulan ketiga yang berperan besar dalam peningkatan ekonomi dan investasi daerah. Sehingga untuk mengakomodir potensi wisata yang dimiliki NTB kemudian

memberikan fasilitas kemudahan investasi di bidang pariwisata yang kemudian berdampak pada peningkatan keberadaan hotel dan usaha wisata di NTB.

Berdasarkan Angka Dalam NTB 2015, terdapat 935 unit hotel dengan 50 diantaranya merupakan hotel berbintang dan 885 hotel kelas melati dan homestay dengan dominasi persebaran usaha pariwisata terbanyak berada di Lombok utara untuk hotel kelas melati, homestay dan rumah makan. Lokasi travel agent terbanyak berada di kota Mataram dan lokasi Hotel berbintang terbanyak berada di Lombok Barat (Bappeda NTB, 2015).

### **1.1 Investment Promotion**

Pada tahap awal program pengembangan pariwisata sebelumnya telah dilakukan promosi investasi pelayanan satu pintu untuk menarik minat investor dengan memangkas system yang dianggap rumit. Kemudian pada program SREGIP dilanjutkan dengan Promosi investasi sebagai salah satu instrument bantuan luar negeri Jerman di khususnya Nusa Tenggara Barat dalam program SREGIP berupa Program Investasi Pariwisata (Adoc. 2017):

1. Strategi bagi peningkatan insentif investasi di sektor pariwisata adalah:
  - a. Pengembangan mekanisme fiskal agar dapat menarik lebih banyak investasi modal asing di sektor pariwisata sesuai dengan undang-undang dan peraturan keuangan; dan
  - b. Pengembangan mekanisme fiskal agar memajukan investasi domestik di sektor pariwisata sesuai dengan undang-undang dan peraturan keuangan.
2. Strategi bagi peningkatan kemudahan investasi di sektor pariwisata termasuk:
  - a. pengurangan proses birokrasi terkait investasi sektor wisata; dan

- b. penerapan peraturan kembali terkait peraturan perijinan.
3. Strategi bagi peningkatan promosi investasi dalam sektor pariwisata termasuk:
  - a. penyediaan informasi atas kesempatan investasi di DPD;
  - b. peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri; dan
  - c. peningkatan sinergi promosi investasi antara sektor pariwisata dengan sektor terkait.

Pada implementasinya, tahap pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah pembentukan kerjasama antar daerah, pemerintah dan swasta yaitu kerjasama antara Kementerian Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Pariwisata dan SREGIP dengan bekerjasama dalam menetapkan standar masa depan Lombok yang berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan yang juga melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti perwakilan masyarakat setempat dan, pelaku industri pariwisata.

### **1.2 Pembentukan dan Penguatan Forum Stakeholder**

Keterlibatan seluruh lapisan pemangku kepentingan dibutuhkan demi terwujudnya implementasi dari rencana induk pariwisata. Hal ini mendorong GIZ melakukan pembentukan “*Tourism Stakeholder Platform*” sebagai forum yang bertugas mengawasi langsung, mendukung dan pengawas dari implementasi proyek SREGIP. Forum ini juga memiliki tugas memperkenalkan standar *The Global Sustainable Tourism Council* atau GSTC pada level perusahaan dan destinasi pariwisata, melakukan evaluasi destinasi pariwisata sesuai standar GSTC serta mendukung kemenpar dalam mengembangkan standar nasional (Bappenas, 2017).

Strategi destinasi berkelanjutan yang berfokus pada keberlanjutan pariwisata berkesinambungan termasuk lingkungan, ekonomi, sosial,

kualitas, kesehatan, dan keamanan serta persoalan estetika yang dikelola oleh masyarakat. Dalam waktu singkat pihak multi-stakeholder terkait termasuk GTSC melakukan pertemuan besar yang menunjukkan komitmen dan minat yang besar. Sinkronisasi Ripparda yang dimasukkan dalam Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan dan menjadi program prioritas STMP (SREGIP, 2017)

**Table 4. Konsensus Publik dan Swasta untuk Pariwisata Lombok Berkelanjutan 2015-2019**

Sektor Pemerintah	Sektor Swasta	Masyarakat
1. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1. Bank	1. LSM Lokal
2. Kementerian Pariwisata	2. Agen Perjalanan	2. Organisasi Pengelola Destinasi
3. Disbudpar NTB	3. Bisnis Unggulan	3. Organisasi Internasional
4. Bappenas	4. Bisnis Pariwisata	4. Masyarakat/Organisasi Masyarakat
5. Bappeda NTB	5. Kerjasama Transportasi	
6. Disbudpar kab/kota	6. Asosiasi	
7. Universitas Mataram		

**Sumber:** Adaptasi dari Kerjasama Jerman, GIZ, dan Bappenas. Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019

### 1.3 Regional Promotion dan Regional Branding

SREGIP dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah juga melakukan regional promotion dan regional branding dengan menghubungkan para pelaku UMKM dan sektor terkait dengan rantai pasar domestik dan internasional. Forum pariwisata daerah menjadi kolaborasi penting yang menghubungkan semua pemangku kepentingan yang mencakup *akademisi, destination management organization*

(DMO), bisnis pariwisata dan institusi pemerintah. Forum ini berfungsi sebagai agen asistensi untuk pengembangan, pengelolaan dan pemasaran pariwisata berkelanjutan serta sebagai pusat komunikasi dan koordinasi (Ripparda, 2015).

Promosi pariwisata di Lombok NTB pada umumnya masih dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghadiri pasar wisata baik dalam maupun luar negeri seperti: *Internationale Tourismus-Börse (ITB)* Berlin, *World Travel Mart (WTM)* London, *Asean Travel Forum (ATF)*, dan Pasar Pariwisata Jakarta. Dengan mengandalkan alat promosi media cetak seperti: pamphlet, brosur, majalah, DVD serta USB. Serta media elektronik yang dimiliki oleh Tour Operator dan Hotel seperti website yang melakukan promosi secara online. Kekurangan mendasar dalam pasar pariwisata NTB ialah bahwa para pelaku usaha pariwisata belum memiliki koordinasi serta informasi terpadu tentang destinasi yang dipasarkan.

Jaringan pariwisata berkelanjutan yang terbentuk dalam mengelola pariwisata berkelanjutan Lombok, ialah Forum Gili Trawangan, Forum Rinjani, Forum Pengelolaan Pariwisata Daerah di tingkat kota atau kota, Forum Diskusi Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Forum Stakeholder Pariwisata Berkelanjutan Nusa Tenggara Barat, dan Nasional Forum Pariwisata Berkelanjutan. Tujuan dari jaringan tersebut adalah untuk menangani beberapa isu lintas sektor pariwisata berkelanjutan di Lombok, khususnya, masalah pengelolaan sampah dan keamanan. Anggota jaringan tersebut adalah LSM, akademisi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, operator pariwisata, masyarakat lokal, dan tokoh agama, termasuk pemangku kepentingan primer dan sekunder.

Asistensi GIZ sebagai mitra pelaksana untuk mendukung program peningkatan stabilitas lingkungan bisnis melalui program SREGIP kemudian melakukan pemetaan analisis *Strenght, Weakness, Opportunity,*

*and Threats* (SWOT). Analisis SWOT kemudian digunakan untuk memetakan ancaman, peluang, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki pulau Lombok di sektor pariwisata yang kemudian akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi serta pemasaran pariwisata berkelanjutan (STMP, 2015).

**Tabel 5. Analisis SWOT Pariwisata Berkelanjutan NTB 2015**

Kekuatan ( <i>Strenght</i> ) yang dimiliki sebagai sebuah destinasi wisata	Kelemahan ( <i>Weakness</i> ) yang dimiliki Lombok
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Posisi geografis yang strategis</li> <li>b. Gunung Rinjani dengan keindahan dan keunikan alamnya</li> <li>c. Hamparan pantai dan ombak;</li> <li>d. Pulau-pulau kecil beserta pantai, ombak, dan keberagaman hayati bawah air;</li> <li>e. Keberagaman budaya (agama, suku adat, tarian, musik, arsitektur lokal, kuliner dan souvenir).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infrastruktur pariwisata;</li> <li>b. Kurangnya tenaga kerja pariwisata profesional;</li> <li>c. Sistem pengelolaan pariwisata yang belum terpadu;</li> <li>d. Lemahnya system manajemen yang mengikutsertakan masyarakat lokal dalam aktifitas kepariwisataan; isu keamanan lokal (kriminalitas) yang tinggi.</li> </ul>
Peluang ( <i>Opportunities</i> ) membangun pariwisata berkelanjutan	Ancaman ( <i>Thereats</i> ) terhadap pembangunan pariwisata Lombok
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membaiknya pasar pariwisata nasional;</li> <li>b. Adanya keinginan kuat dari wisatawan domestic dan mancanegara untuk mendapatkan pengalaman wisata yang unik dan berkelanjutan;</li> <li>c. Beroperasinya bandara internasional Lombok;</li> <li>d. Munculnya beberapa institusi pendidikan kepariwisataan;</li> <li>e. Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata di Lombok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pesatnya pembangunan kepariwisataan termasuk kualitas SDM yang lebih unggul pada destinasi lain yang berdekatan;</li> <li>b. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dunia yang masih belum kondusif;</li> <li>c. Adanya dampak dari perubahan iklim dan meningkatnya kunjungan wisatawan yang mengakibatkan meningkatnya carbon footprint.</li> </ul>



Sumber: Adaptasi kerjasama Jerman, GIZ GmbH dan Bappenas, Rencana Induk Pariwisata Berlanjutan Pulau Lombok NTB 2015-2019

Pada implementasi pengembangan SDM, SREGIP serta mitra kemudian melaksanakan pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan kapasitas serta meningkatkan kesadaran pariwisata berkelanjutan kepada pelaku UMKM bisnis pariwisata agar lebih inklusif serta berlanjut agar mampu bersaing dengan bisnis pariwisata lain yang telah mapan melalui pelatihan dan layanan konsultasi usaha seperti pemasaran, promosi, dan manajemen usaha. Pelatihan yang diberikan berupa:

- Pelatihan Penyusunan Pembukuan Sederhana  
Tujuan: sebagai bentuk peningkatan kapasitas manajemen pelaku usaha dan pengelolaan Desa Wisata Hijau yang dilaksanakan pada 17-19 Januari 2017.
- Pelatihan Menulis Bahan Promosi Dan Pemasaran Pariwisata  
Tujuan: sebagai bentuk pengembangan pengetahuan SDM dalam mengelola bisnis pariwisata yang dilaksanakan di Sesaot pada 12-13 Oktober 2016; Mataram pada 08 Desember 2016
- Pelatihan Pariwisata dan Homestay  
Tujuan: sebagai bentuk upaya menyediakan tenaga kerja professional dalam pelatihan dasar pengelolaan Homestay yang dilaksanakan di Seasot, 30 November 2016.
- Pelatihan Perencanaan dan Operasional Paket Wisata Desa Wisata Hijau  
Tujuan: sebagai bentuk pelatihan untuk memberikan bekal wawasan, pengetahuan dan praktik kesadaran pariwisata berkelanjutan destinasi wisata.

Dalam perkembangannya telah sesuai dengan rencana, organisasi utama serta pemangku kepentingan terkait terlibat aktif namun selama

pelaksanaan SREGIP tidak terealisasinya manajemen organisasi destinasi formal dalam penerapan STMP. Forum pemangku kepentingan yang terlibat mulai dari swasta, publik, NGO, masyarakat publik, serta pihak pemerintah daerah yang berjumlah 72 peserta telah dibentuk namun dalam koordinasinya tidak diterapkan dengan baik (Adoc, 2017). Meskipun masyarakat lokal terlibat dalam industry pariwisata berkelanjutan Lombok namun kurangnya arahan dan kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata seperti kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal serta kerjasama antara masyarakat lokal dengan operator pariwisata masih kurang.

## **2. Enabling Enviroment Support Programme**

Secara umum, instrument *Enabling Enviroment Support Programme* membahas pemberian dukungan stabilitas iklim lingkungan bisnis yang diarahkan pada regulasi dan deregulasi pada tatanan pemerintah daerah NTB serta pada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang dimaksud adalah jaringan petani, UMKM dan koperasi yang bergerak dibidang pariwisata. Dalam proses asistensi, GIZ sebagai agen perwakilan Jerman menjadi pihak atau intuisi mapan kemudian membentuk konsensus antara pihak publik dan swasta dalam mendukung pengembangan pasar domestik dan luar negeri sebagai pelatihan dan akses teknologi baru dalam mengelola pariwisata berkelanjutan.

Dalam menciptakan kesiapan untuk perubahan menuju pariwisata berkelanjutan diperlukannya faktor pendorong dari pemangku kepentingan eksternal. Contoh dari pendorong eksternal keberlanjutan adalah legitimasi sosial, membangkitkan/memulihkan kepercayaan, meningkatkan kesadaran, lobi politik, aliansi dan kemitraan, perjanjian internasional, mengurangi tekanan peraturan, pengurangan pencemaran, kebijakan dan peraturan pemerintah nasional, perbandingan pesaing, kepuasan pelanggan, dan ekspektasi pasar (Lozano, 2013).

Terdapat beberapa jaringan dalam mewujudkan program berkelanjutan yaitu stakeholder eksternal berupa instansi mapan atau berpengalaman dalam menjalankan program contohnya organisasi internasional dalam kasus ini adalah GIZ dan GTSC oleh UNWTO, stakeholder internal seperti perangkat pemerintahan daerah terkait dan stakeholder penghubung yaitu forum yang dibentuk dari perwakilan masing-masing pihak yang terkait dalam tujuan program seperti perwakilan pemangku adat, pemuka agama, perwakilan pihak swasta dan UMKM. Jenis UMKM yang dipilih adalah pembangunan Green Tourism Development yaitu Desa Wisata Hijau, Good Agriculture Practice berdasarkan standar yang ditetapkan oleh GTSC agar terciptanya jaringan antara petani dengan industri dan perhotelan serta Inovasi dan Teknologi seperti manajemen pengelolaan sampah.

Lingkup kerja SREGIP dalam pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan nilai tambah, inklusivitas dan keberlanjutan lingkungan pada usaha kecil dan menengah, serta kelompok petani di daerah sektor intervensi. Dalam asistensinya GIZ kemudian melakukan model kerjasama yang inovatif dalam rangka penyelesaian hambatan dan mengimplementasikan peluang bisnis di Desa Wisata Hijau seperti *Linkage Farmer and Industry*, Manajemen Homestay, Kewirausahaan, dan Pemasaran. Program kemitraan tersebut sebagai upaya dukungan potensi pengembangan produk pariwisata di pulau Lombok NTB (Bappenas, 2017).

**Tabel 6. Lingkup Kerja SREGIP Dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Program berkelanjutan	Latarbelakang	Intervensi SREGIP	Langkah selanjutnya
Pembangunan Wisata Hijau	- Membangun Platform/mekanisme untuk tukar pengetahuan dan	- Manajemen destinasi - Daya tarik wisata	- Standarisasi kualitas, kuantitas dan promosi

	temu bisnis dengan penyedia industri dan jasa pariwisata.		- Jejaring petani, UMKM, koperasi dan jasa penginapan
Good Agriculture Practice	-	-	-
Inovasi dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan SDM terhadap teknologi dan inovasi dalam peningkatan hasil produksi UMKM</li> <li>- Membangun strategi diseminasi inovasi bersama penyedia jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kelembagaan.</li> <li>- Pendirian Bank Sampah</li> <li>- Membangun jaringan.</li> <li>- Menciptakan model bisnis</li> </ul>	
Efisiensi Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan sumber daya (energy listrik, air, dan pengelolaan sampah) belum optimal</li> <li>- Kapasitas kelembagaan dan SDM sektor pariwisata terbat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi berdiri dan beroperasinya Asosiasi Chief Engineering (ACE) serta Asosiasi Hotel Mataram (AHM)</li> <li>- Peningkatan kapasitas lembaga</li> </ul>	- ACE dan stakeholder lainnya dapat bersinergi

		- Membangun keterkaitan jaringan antara lembaga pendidikan dan industri pariwisata	
--	--	--	--

Sumber: BAPPENAS, 2017

Untuk mengkatalisasi implementasi pariwisata berkelanjutan dalam jaringan multistakeholder di Lombok, *Driver To Change* diidentifikasi yang dapat dibagi menjadi driver eksternal, penghubung, dan internal. Penggerak tersebut diakui oleh pemangku kepentingan primer dan sekunder di semua kelompok pemangku kepentingan berbasis fungsional (pakar, pemerintah, masyarakat lokal, operator pariwisata, wisatawan, dan lembaga kolaboratif) (Norrista, 2016).

Dalam mengelola perencanaan perubahan organisasi menuju pariwisata berkelanjutan dalam jaringan multi-stakeholder, driver eksternal, penghubung, dan internal diidentifikasi. Sesuai dengan penelitian Lozano (2013), para pemangku kepentingan mengakui ekspektasi pasar tentang pariwisata berkelanjutan dalam tren global baru-baru ini sebagai pendorong eksternal utama untuk mengembangkan tujuan wisata berkelanjutan. Para pemangku kepentingan selanjutnya mengidentifikasi media sosial sebagai penggerak penghubung utama. Media sosial digunakan tidak hanya untuk menarik perhatian masyarakat di wilayah yang lebih luas, tetapi juga sebagai alat kampanye keberlanjutan untuk mendorong anggota jaringan dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Pada stakeholder eksternal dapat dijelaskan sebagai penggerak yang mengurus faktor-faktor luar jaringan sebagai pendukung pariwisata berkelanjutan seperti agen GIZ sebagai penyedia kerjasama dengan GTSC

dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di NTB. Stakeholder eksternal dianggap sebagai pendorong implementasi keberlanjutan dalam aliansi para pemangku kepentingan. Untuk stakeholder internal, dapat digambarkan sebagai penggerak inti alam jaringan menuju pariwisata berkelanjutan. Stakeholder internal dalam jaringan adalah perangkat pemerintahan terkait yaitu Bappenas, Bappeda, kementerian pariwisata dan dinas pariwisata serta BPKM.

### **2.1 Investment Promotion**

Setelah dalam proyek sebelumnya di NTB dilakukan perbaikan iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperbaiki dan sinkronisasi regulasi tentang perizinan investasi melalui satu pintu serta pelaksanaan standar operasional pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dalam implementasi proyek SREGIP pada program *Investment Promotion* adalah dengan memperbaharui kebijakan investasi di NTB secara eksplisit yang mengatur tentang penanaman modal terutama di bidang pariwisata yaitu dengan mempromosikan system kemudahan izin usaha.

### **2.2 Kemudahan Izin Usaha**

Dalam bidang pariwisata terdapat tiga golongan prioritas yaitu sektor koperasi, sektor swasta dan sektor UMKM. Pada sektor koperasi, investment promotion berupa kemudahan PTSP dalam pengurusan izin usaha simpan pinjam, dan pembukaan kantor cabang. Pada sektor UMKM, jenis perizinan yang diatur yakni izin penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah/kabupaten/kota dalam satu provinsi. Dan terakhir pada sektor swasta jenis perizinan yang diatur adalah izin usaha perdagangan minuman beralkohol, toko bebas bea, serta izin usaha perdagangan bahan berbahaya yang terdaftar (SK GUB, 2015).

### **2.3 Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Sebagai *Planning Regulation*, perencanaan serta pencapaian telah dilaksanakan dengan adanya Ripparda dan serta adanya Surat Keputusan Gubernur dan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal terkait perizinan di bidang penanaman modal. Penguatan PTSM serta penerapan dalam pengurusan perizinan investasi di NTB menjadi lebih mudah, cepat, transparan, terorganisir serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil laporan BKPM tahun 2015 menunjukkan lonjakan investasi asing yang mencapai angka Rp 9.99 triliun dimana melampaui target RPJMD dan pencapaian tertinggi selama sejarah investasi asing di NTB sejak dikeluarkannya kebijakan kemudahan investasi sebagai upaya Investment Promotion dalam pengembangan investasi daerah yang berkelanjutan. program ini menjadi lingkup kerja SREGIP sebagai salah satu area intervensi utama dalam asistensi peningkatan kapasitas dan tata kelola.

#### **4.3 Privatization and Commercialisation Programmes**

Bantuan luar negeri Jerman oleh GIZ di NTB dalam pengembangan ekonomi lokal mendukung privatisasi dan komersialisasi dengan melakukan dua langkah pada implementasinya. Pertama, yaitu melakukan peningkatan infrastruktur publik. Dalam hal ini Jerman bertujuan mendukung kegunaan infrastruktur publik dengan cara berupa pemberian asistensi peran pemerintah dalam memfasilitasi dan pembentukan kerangka kerja yang berkaitan dengan swasta. Kemudian yang kedua, Jerman melakukan persiapan proses privatisasi dengan cara menggunakan dana anggaran bantuan untuk menutupi pengeluaran dan utang serta menyediakan dana untuk membiayai seluruh proses privatisasi dan komersialisasi.

Pemangku kepentingan primer dan sekunder operator pariwisata menyelenggarakan pendekatan pariwisata berkelanjutan dengan dukungan kontribusi keuangan. Perancangan berbagai ide dan pengembangan inovasi kemudian mendorong penerapannya ke masyarakat yang lebih luas melalui

beberapa kampanye, pelatihan dan lokakarya dengan pemangku kepentingan primer sebagai kontributor sumber daya keuangan untuk memulai jaringan, mengembangkan rencana dan melaksanakan pariwisata berkelanjutan.

Untuk mengenali strategi multi-stakeholder dalam merencanakan manajemen perubahan organisasi menuju pariwisata berkelanjutan, peran masing-masing pemangku kepentingan harus diidentifikasi. Peran tenaga ahli memiliki kemampuan untuk mengembangkan pelatihan pariwisata berkelanjutan kepada pemangku kepentingan lain seperti contoh GIZ sebagai tenaga ahli dari pihak donor mampu mengembangkan dan melaksanakan pelatihan pariwisata berkelanjutan yang kemudian bekerja sama dengan ahli pariwisata berkelanjutan lain yaitu GTSC (Norrist, 2017). Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama juga memiliki kontribusi keuangan dalam mengembangkan rencana induk pariwisata berkelanjutan. Perencanaan program, pendanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait.

Secara lebih lanjut GIZ juga mengatur serta mengarahkan untuk melakukan kunjungan lapangan pariwisata berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan lain untuk mendapat masukan dan gambaran tentang pariwisata berkelanjutan. Para ahli kemudian secara aktif membagikan ide-ide tentang pariwisata berkelanjutan ke dalam jaringan, seperti melalui coffee morning bulanan (evaluasi) untuk membahas isu-isu hambatan pariwisata yang mendesak.

Destinasi yang telah terbangun kemudian memiliki system untuk mendukung usaha kecil menengah dan lokal serta mempromosikan pengembangan produk lokal berkelanjutan serta prinsip perdagangan adil yang berbasis lingkungan dan budaya setempat termasuk makanan, minuman, kerajinan tangan, pertunjukan seni, produk pertanian dan lainnya. Kerjasama kemitraan kemudian dilakukan dalam mendukung sumber daya keuangan seperti yang dalam RIPPARDA yaitu:

- a. Awig-awig menyediakan lahan masyarakat bagi anggota masyarakat untuk digunakan sebagai usaha pariwisata;



- b. Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten memiliki jaringan kerjasama dengan departemen perindustrian dan perdagangan untuk melaksanakan pelatihan bagi usaha wisata kelas menengah untuk meningkatkan kemampuan usahanya;
- c. Dinas Provinsi dan Kabupaten serta kementerian koperasi dan UKM memiliki program spesifik dan dana sosial guna mendukung pembangunan infrastruktur;
- d. GIZ melaksanakan pelatihan keuangan keberlanjutan dan pendanaan program UMKM terpilih bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran keuangan serta dukungan keuangan.

### **3.1 Asistensi Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik**

Dalam mendukung peningkatan infrastruktur pelayanan publik pada program SREGIP, GIZ sebagai instuisi mapan (tenaga ahli) dianggap sebagai kontributor keuangan untuk memulai jaringan, mengembangkan rencana dan melaksanakan program pariwisata berkelanjutan (Norrist, 2017). Bersama dengan para ahli pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan utama pemerintah memprakarsai perencanaan dan mendanai pembentukan jaringan multi-pemangku kepentingan (forum) untuk pelaksanaan program yang dikendalikan, dipantau dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan pemerintah berdasarkan standak indicator pariwisata yang dikembangkan GTSC.

Asistensi GIZ dalam mendukung sektor publik/swasta melalui kepentingan pembangunan infrastruktur pelayanan publik dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Asistensi Pemangku Kepentingan Pendukung  
Infrastruktur Pelayanan Publik**

No.	Instansi/Lembaga	Bentuk Dukungan
1.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pembentukan koperasi kelompok usaha</li> <li>- Bantuan modal dana bergulir</li> <li>- Fasilitas promosi</li> <li>- Pelatihan teknis produksi</li> </ul>
2.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi NTB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan peningkatan mutu</li> <li>- Pembinaan UMKM</li> </ul>
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi</li> </ul>
4.	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan manajemen usaha</li> </ul>
5.	Perusahaan, Asosiasi Hotel Mataram (AHM), dan Koperasi Tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas pengembangan jaringan usaha</li> <li>- Pelatihan peningkatan mutu</li> <li>- Pelatihan manajemen</li> </ul>
6.	Lembaga Keuangan dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan keuangan berkelanjutan</li> <li>- Kegiatan simpan pinjam bagi UMKM</li> </ul>
7.	Lembaga Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan</li> </ul>

Sumber: Bappenas: Bahan Paparan Closing SREGIP, 2017

Asistensi yang dilakukan oleh GIZ dengan melibatkan sektor publik (pemerintah) serta instansi terkait menjadi pendukung infrastruktur pelayanan pengembangan Green Tourism melalui program Desa Wisata Hijau binaan SREGIP. Institusi yang terkait antara lain Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, serta BAPPENAS dan BAPPEDA.

Pemangku kepentingan primer dan sekunder operator wisata menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui program

pengembangan sumber daya manusia berupa pelatihan sebagai upaya penanaman kesadaran serta menyediakan tenaga kerja professional lainnya dalam praktik pariwisata berkelanjutan. Seperti pelatihan dari hasil kemitraan oleh Mataram Hotel Assosiation dan Allianz Indonesia. Promosi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan utama dan sekunder ialah untuk meningkatkan kesadaran pariwisata berkelanjutan. Mereka juga memberikan konsep ide mereka dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ide yang diberikan oleh pamangku kepentingan sekunder operator pariwisata hanya dapat dilaksanakan pada fase implementasi dan bukan untuk fase perencanaan. Oleh karenanya pemangku kepentingan utama operator pariwisata berkontribusi menyediakan sumber daya keuangan dalam pengembangan data.

### **3.2 Pendanaan Asistensi Infrastruktur Pelayanan Publik**

SREGIP sebagai bantuan luar negeri Jerman mendukung peningkatan infrastruktur pelayanan public di NTB dengan GIZ sebagai perwakilan donor Jerman menyediakan dana hibah untuk membiayai proses asistensi program. Bantuan kerjasama melalui dana hibah sebesar 4.400.000 Euro atau sebesar Rp. 52.800.000.000.

Pendanaan pelatihan infrastruktur publik dibagi menjadi dua bagian. Pendanaan pertama ditujukan sebagai pengembangan pelayanan publik pada sektor swasta atau UMKM dengan pelatihan standarisasi kualitas dan pembentukan jaringan usaha terhadap UMKM dengan sektor pelayanan jasa penginapan (perhotelan) dan jaringan destinasi wisata lainnya.

Pelatihan pendanaan asistensi infrastruktur pelayanan public ke dua ditujukan untuk membangun destinasi wisata dengan mengembangkan Destinasi Desa Wisata Hijau berdasarkan standarisasi GTSC. lokasi pengembangan desa wisata hijau yaitu berada di Desa Sesaot, Desa Bilebante, dan Desa Sembalun dengan asistensi pelatihan, pendampingan serta pengembangan dan pemasaran produk paket destinasi pariwisata berkelanjutan.

Produk wisata yang dihasilkan dari destinasi wisata terdiri dari berbagai elemen mulai dari fasilitas, layanan, keunikan, aktivitas, atraksi hingga warisan budaya yang disuguhkan yang tidak hanya menyediakan ruang fisik namun aktivitas wisata yang melibatkan pengunjung hingga keterlibatan seluruh industri lokal pariwisata di dalamnya menjadi paket wisata.

Sebagai produk pariwisata, paket wisata menggabungkan beberapa unsur dari berbagai pemasok yang berbeda yang digunakan untuk mewakili sebuah destinasi wisata. Paket wisata sendiri terdiri dari berbagai rantai nilai pariwisata dimulai dari keunikan kebudayaan, akomodasi, transportasi, layanan perjalanan atau travel agent atau tour operator, makanan dan minuman, ritel, dan lainnya yang berperan menyatukan berbagai sub-pariwisata. Paket wisata akan berperan sebagai destinasi wisata yang akan dipergunakan sebagai alat promosi atau branding bagi destinasi wisata itu sendiri dan para pelaku industri pariwisata (SREGIP, 2017).

Dalam implementasinya, destinasi memiliki sistem yang memberikan perusahaan, pengunjung, hingga publik berkontribusi didalamnya hingga dapat menginisiasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pariwisata berkelanjutan. Dalam pembangunan infrastrukturnya masyarakat kemudian diberikan dukungan berupa pelatihan dan inovasi yang sesuai standarisasi keberlanjutan. berupa sebagai berikut:

**Tabel 8. Asistensi Pemangku Kepentingan dalam Pendanaan sebagai Bentuk Dukungan Bagi Masyarakat, Pengusaha Lokal dan Perdagangan pada Infrastruktur Pelayanan Publik**

No.	Instansi/Lembaga	Bentuk Dukungan	Implementasi
1.	Awig-Awig	- Menyediakan lahan masyarakat bagi anggota masyarakat untuk digunakan sebagai usaha wisata	- Dialog kelompok oleh masyarakat Banyumelek,

			Sukarara, dan Sekarbela
2.	Pemerintah dan Bank NTB	- Program pendanaan mikro untuk perluasan usaha pariwisata dan Start Up	- Bisnis Inkubator - Keuangan berkelanjutan
3.	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten, dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan	- Melaksanakan pelatihan bagi usaha wisata kelas menengah sebagai upaya peningkatan kualitas	- Pelatihan kewirausahaan - Pelatihan Standar produk lokal
4.	Kementerian Koperasi dan UKM	- Dukungan dana berkelanjutan - Bantuan dana sosial dalam mendukung pembangunan infrastruktur	- Pelatihan kewirausahaan
5.	GIZ dan OJK	- Pelatihan kesadaran keuangan	- Pelaksanaan pelatihan dan pengawasan

Sumber: GTSC Evaluation Report, 2016

Sistem destinasi juga berlaku bagi usaha kecil menengah dan lokal berkelanjutan serta perdagangan berkeadilan yang berbasis lingkungan, budaya setempat baik berupa makanan dan minuman, kerajinan tangan, pertunjukan seni dan kebudayaan, produk pertanian serta layanan jasa penginapan. Asistensi dilakukan bertujuan untuk mendukung dan membangun kapasitas lokal serta usaha kecil menengah, penggunaan

produk lokal baik barang maupun jasa, mempromosikan dan membangun produk berkelanjutan yang berbasis alam dan budaya lokal, serta melibatkan seniman, petani, penyedia jasa dan produk lokal dalam rantai nilai pariwisata (GTSC, 2016).

#### **4 Bussines Partnership Programmes**

Kerjasama bantuan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Jerman ialah agar tercapainya tujuan untuk menjalin kemitraan usaha antara perusahaan donor dengan pihak penerima. Pada instrument Bussines Partnership Program ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya terutama di NTB. Dalam implementasinya memiliki resiko yang besar dimana kondisi iklim investasi serta stabilitas politik di NTB tidak stabil pasca kerusuhan yang terjadi pada tahun 2000. Selain itu faktor tingkat SDM yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global masih minim.

Meskipun angka pertumbuhan ekonomi NTB mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya namun masih belum mampu memenuhi standar nasional. Kesenjangan pembangunan menjadi faktor utama dalam mempengaruhi stabilitas pembangunan NTB. Disamping itu, dalam indikator bussines partnership programme dibutuhkan hubungan jangka panjang dalam pelaksanaannya antara kedua pihak baik pihak donor maupun pihak penerima.

Namun potensi kekayaan alam NTB pada sektor pariwisata tidak dapat dikatakan minim. Terletak diantara Segitiga Emas estinasi pariwisata utama Indonesia yakni di sebelah barat oleh Tana Toraja, sebelah utara oleh Bunaken dan disebelah timur oleh Pulau Komodo. Oleh karena itu, sebagai tahap awal dalam mitra pelaksana dilakukan pembentukan project assistensi kepada NTB sebagai mitra penerima bantuan. Pada instrument Bussines Partnership memiliki lima indikator yang akan menjadi pelaksanaan assistensi prioritas sebagai penunjang kemitraan. Kelima indikator prioritas assistensi tersebut adalah sebagai berikut (Lancaster, 2007):

1. GIZ mendukung perluasan lapangan kerja;

2. GIZ mendukung upaya peningkatan produktivitas usaha;
3. GIZ mendukung pengembangan SDM yang mampu bergerak di bidang ekspor;
4. GIZ memperkenalkan standar kesehatan dan keselamatan kerja;
5. GIZ mendukung peningkatan taraf hidup perempuan.

Dalam upaya menuju pariwisata berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi yang optimal antara pemangku kepentingan seperti para ahli, pemerintah, masyarakat lokal, operator hingga wisatawan. Pembentukan jaringan multi-stakeholder yang terdiri dari pemangku kepentingan primer dan sekunder yang dapat bersinergi sangat dibutuhkan.

#### **4.1 Menciptakan Lapangan Pekerjaan**

Asistensi GIZ dalam memfasilitasi pelatihan-pelatihan dalam mendukung peningkatan infrastruktur pelayanan publik di NTB diharapkan dapat mampu meningkatkan SDM dalam rangka memperluas daya serap lapangan kerja sesuai standar global yang mampu bergerak di bidang ekspor. Intervensi GIZ dalam memberikan asistensi usulan strategi pengembangan ekonomi lokal pada mitra publik dan swasta yang terlibat dalam usaha tani serta pelaku UMKM yang terlibat dalam sektor pariwisata berkelanjutan di NTB.

Dalam 2 dekade pasca kerusuhan Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah yang cukup pesat. Selama beberapa tahun terakhir pemerintah daerah NTB giat melakukan peningkatan investasi baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Baik melalui strategi yang terangkum dalam RPJMD maupun pembentukan sejumlah kebijakan yang pro-investasi seperti pada program LRED dengan melakukan standarisasi SOP kebijakan investasi terpadu satu pintu kemudian pada program SREGIP menerapkan kebijakan yang pro-investasi. Hingga pada tahun 2014 perekonomian maupun investasi di NTB masih didominasi sektor

pertanian dan pertambangan sebesar masing-masing 26,15 persen dan 18,58 persen. Analisis dari PDRB berdasarkan lapangan usaha di NTB sektor pariwisata (hotel dan restoran) menempati posisi ketiga (BPS NTB, 2015).

Asistensi GIZ pada kemitraan publik/swasta sebagian besar pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sebagian besar bergerak pada sektor swasta. Program pelatihan dan pembinaan dilakukan selama lima hari dimulai pada bulan maret hingga awal april 2016. Pelatihan yang diberikan berfokus pada usaha restoran, kelompok seni, transportasi, transportasi, suplayer hotel, salon dan spa. GIZ bekerjasama mengundang ahli trainer bisnis dari Australia, trainer lokal dari ketua Asosiasi Hotel Mataram dan pimpinan BRI Mataram untuk memberikan pelatihan teknis operator, travel agent dan lainnya. Materi pelatihan yang diberikan memberikan spesifikasi pada perencanaan bisnis, riset pasar serta analisis resiko. Materi pemasaran, standar pelayanan pelanggan hingga pelatihan pembukuan juga di berikan sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang professional dibidangnya sehingga peserta pelatihan mendapat transformasi pengetahuan keterampilan yang efektif (GlobalFM, 2016).

Pada pertumbuhan industri formal maupun non-formal di NTB pada tahun 2016 jumlah perusahaan terbesar berasal dari sektor perdagangan yaitu rumah makan dan hotel yang mencapai 23,21 persen terhadap pembentukan PDRB kota Mataram yang menjadikan kota Maram mengarah pada struktur jasa (*Service City*) yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata serta pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis (BPS NTB, 2016). Hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan keberadaan perusahaan, rumah makan serta hotel terhadap PDRB yang menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor dengan persentase peningkatan tenaga kerja sebesar 22,22 persen pada tahun 2017, naik 3,8 persen dari tahun 2014.



#### 4.2 Meningkatkan Produktivitas Usaha (Bisnis)

Asistensi GIZ sebagai pihak donor pada bantuan luar negeri Jerman mendukung peningkatan produktivitas usaha di NTB dengan memberikan pelatihan dan pengembangan dalam bentuk pendampingan, membentuk jaringan bisnis antara petani atau pelaku UKM dengan industry pariwisata. Asistensi GIZ dan mitra mengembangkan model kerjasama inovatif yaitu membangun Desa Wisata Hijau dan pengembangan model bisnis antara partner bisnis dengan UMKM dari CSR-Philantrophy ke bentuk Core Bussines (Bappeda, 2017).

SREGIP membentuk kemitraan dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak pemangku kepentingan utama pemerintah tingkat nasional yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa. GIZ kemudian mengembangkan ide paket wisata menarik yang memenuhi kebutuhan wisatawan akan produk ekowisata yang juga dapat menghormati kepentingan masyarakat setempat tanpa menghilangkan otentitas masyarakat dengan melestarikan integritas, serta keaslian desa hingga kebudayaan wilayah tersebut. Dalam pengembangannya GIZ memberikan pelatihan-pelatihan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasiskan ekonomi lokal berdasarkan siklus kegiatan pariwisata sebagai berikut.

**Tabel. Siklus Kegiatan Pariwisata**

No	Kegiatan Pariwisata	Rantai Nilai	Asistensi
1.	Wisatawan	Promosi	- Pelatihan Menulis Bahan Promosi dan Pemasaran Pariwisata
2.	Entry Gate	Pengelola transportasi	- Dukungan infrastruktur bandara

			- Kerjasama kemitraan layanan penerbangan domestik
3.	Akomodasi	- Penginapan - Restoran/Rumah Makan	- Pelatihan Pariwisata dan Homestay - Pelatihan UMKM
4.	Objek/Atraksi	- Destinasi Wisata - Pemandu Wisata - Pengrajin UMKM - Kuliner	- Pelatihan Pariwisata dan Homestay - Pelatihan UMKM
5	Destinasi Wisata Hijau	- Destinasi Desa Wisata Hijau	- Pelatihan Pariwisata dan Homestay - Pelatihan UMKM - Pelatihan Promosi dan Pemasaran Pariwisata - Pelatihan Pembukuan

Sumber: SREGIP: What is SREGIP?, 2017

Dalam mendukung peningkatan produktivitas usaha bisnis, GIZ memberikan pembentukan rencana aksi berupa pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan standarisasi GSTC yaitu: Pemetaan Destinasi Wisata, Pengembangan ekonomi berkelanjutan, Pusat Komersialisasi dan Keamanan dan Keselamatan. Forum pemangku kepentingan yang terelibat mulai dari swasta, publik, NGO, masyarakat publik, serta pihak pemerintah daerah yang berjumlah 72 peserta juga telah dibentuk dalam mendukung pariwisata berkelanjutan.

#### **4.3 Membangun SDM yang Mampu Bergerak dibidang Ekspor**

Dalam ekonomi pembangunan komponen sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat bersinergi yang ditandai dengan kemajuan pada seluruh aspek. Pada umumnya pembangunan daerah

ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditargetkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pembangunan daerah. Kebutuhan tenaga kerja yang mumpuni menjadi salah satu faktor penentu iklim investasi suatu daerah. Kebutuhan tenaga kerja sesuai standar global menjadi penghambat pengembangan ekonomi. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTB, angka pencari kerja setiap tahunnya mengalami kenaikan. Setiap angkatan kerja memiliki latarbelakang pendidikan yang bervariasi dimulai dari tingkat lulusan sekolah dasar hingga kalangan terpelajar lulusan perguruan tinggi.

Dukungan kemitraan yang dilakukan oleh GIZ sebagai lembaga donor Jerman bertujuan untuk meningkatkan SDM yang berorientasi ekspor. Asistensi yang telah diberikan oleh GIZ berupa pemetaan hambatan permasalahan. Dengan solusi yang ditawarkan adalah pemberian pelatihan pembangunan SDM melalui kegiatan Training of Trainer (ToT).

Asistensi GIZ berupa ToT kepada pemangku kepentingan utama yaitu pembentukan forum sebagai pelaksana hingga evaluator program SREGIP yang terdiri dari perwakilan masing-masing pemangku kepentingan yang di training langsung oleh GTSC UNWTO dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Forum dibentuk yang kemudian akan menjadi jaringan pelaksana pariwisata berkelanjutan di NTB.

Kemudian ToT juga dilaksanakan pada setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan secara keseluruhan dengan trainer yang memiliki spesialisasi khusus serta pengalaman yang sesuai program pelatihan yang dilaksanakan untuk mendukung SDM yang mampu bergerak di bidang ekspor sesuai kebutuhan standarisasi global.

#### **4.4 Pengenalan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Pada asistensi GIZ dalam program SREGIP tidak memiliki slot pelaksanaan dalam perencanaan hingga pelaksanaan untuk pengenalan standari kesehatan dan keselamatan kerja di sektor pariwisata berkelanjutan. Dalam implementasinya hanya berfokus pada pelaksanaan standarisasi operasional pariwisata global termasuk pada kebutuhan standar wisatawan pada sektor akomodasi serta upaya pencegahan eksploitasi anak dibawah umur, pelecehan dan meminimalisasi tingkat kriminalitas destinasi wisata dalam menjamin keamanan para wisatawan.

#### **4.5 Meningkatkan Taraf Hidup Perempuan**

Bantuan luar negeri Jerman melalui asistensi GIZ sebagai mitra pelaksana dengan memfasilitasi pelatihan-pelatihan UMKM tidak membatasi ruang gerak perempuan dan dalam pelatihan kualitas hingga quality control produk UMKM baik sektor kuliner maupun cenderamata di dominasi oleh perempuan dalam program Desa Wisata Hijau.

Peluang bisnis produk UMKM dari makanan khas hingga cenderamata dimaksudkan agar terciptanya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan dukungan program dana keberlanjutan dari Kementerian Koperasi dan UKM serta upaya membangun jaringan antara petani dan pelaku UMKM dengan sektor industry pariwisata yang sesuai standar dari pemberian pelatihan dengan pihak pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan jumlah pencari kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2014 menunjukkan dominasi dari pencari kerja laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor tingkat latarbelakang pendidikan yang dimiliki perempuan dapat dikatakan masih rendah yaitu berjumlah 12.937 orang dimana lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berjumlah 12.501 orang.

Namun penempatan angkatan kerja informal banyak didominasi oleh perempuan seperti pada tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa hingga tenaga usaha pertanian masih didominasi oleh perempuan. Hal ini berasal

dari pelaku usaha UMKM kuliner hingga makanan khas didominasi oleh kelompok usaha UMKM (BPS, 2017).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Implementasi kerjasama bilateral Indonesia Jerman dalam bentuk bantuan luar negeri yang berfokus pada Private Sector Development yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat dalam program Sustainable Regional Economic Growth Investment Programme yang dilaksanakan pada tahun 2015-2017 memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Jerman sebagai pihak donor yang dilaksanakan oleh agen GIZ melaksanakan asistensinya di Indonesia tepatnya di provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan program dukungan terhadap pertumbuhan investasi ekonomi lokal di sektor pariwisata. GIZ kemudian memberikan dukungan dalam peningkatan iklim bisnis yang kondusif melalui pemberian dukungan pada stabilitas iklim bisnis dengan menerapkan good government yang mendukung penerapan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya mendukung program program jaringan kemitraan usaha dan yang terakhir GIZ sebagai mitra mendukung pelaksanaan program dengan memfokuskan promosi investasi melalui pelayanan investasi satu pintu yang lebih eksplisit di bidang pariwisata.

Pada program SREGIP dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui intervensi penguatan institusi dan kerangka kebijakan pasar dengan membantu mitra untuk dapat menganalisis pasar luar negeri dengan memberikan pengarahan terhadap kerangka kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan serta menjai jembatan antara intuisi professional tingkat global GTSC dengan memberikan arahan dalam perumusan kebijakan (perumusan RIPARDA 2015) yang berkaitan erat dengan pariwisata berkelanjutan serta pelatihan dan akses teknologi.

Kemudian pada program berkelanjutan yaitu mendukung stabilitas bisnis kecil dan menengah melalui pemberian pelatihan-pelatihan yang bertujuan sebagai faktor membangun kemandirian dalam pengelolaan bisnis. GIZ kemudian berupaya memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk keberlanjutan program yang sesuai dengan

tujuan pariwisata berkelanjutan untuk menciptakan kesadaran keberlanjutan program yang kontinu.

Selanjutnya, GIZ kemudian memberikan dukungan pada proses privatisasi dan komersialisasi yang pada kasus ini dimana *Enterpreneurship* yang dimaksud adalah mitra UMKM (komersialisasi) agar mampu bersaing pada jaringan yang lebih luas dan mandiri dengan membentuk sistem modal berkelanjutan seperti Desa Wisata Hijau.

Terakhir, secara keseluruhan bantuan Jerman sebagai pihak donor dengan karakteristik pemberian bantuan pada pengembangan ekonomi lokal berusaha menciptakan lapangan kerja yang lebih luas pada sektor terpilih, peningkatan produktivitas usaha, membentuk jaringan kemitraan antara pihak masyarakat dengan sektor swasta, serta menciptakan SDM yang berorientasi keberlanjutan.

## **2. Saran**

1. SREGIP sebagai program pilot dalam pariwisata berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Barat, namun dalam pelaksanaannya hanya berfokus pada pulau Lombok secara terpusat. Untuk daerah lain di wilayah administrasi NTB tidak menjangkau secara keseluruhan. jika ditinjau lebih lanjut, hampir keseluruhan wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki destinasi wisata yang menarik.
2. Terkait keberlanjutan, pemerintah daerah terdapat beberapa point penting dalam pariwisata berkelanjutan yaitu dengan semakin terbukanya potensi pariwisata maka akan mempengaruhi footprint wisatawan yang membawa dampak perubahan iklim dan adaptasi lingkungan. Dibuktikan adanya persoalan serius pada menurunnya ambang batas air tanah akibat penggunaan berlebihan hingga berujung pada penggunaan air garam (kasus berkembang pesatnya Homestay).
3. meningkatnya jumlah wisatawan setiap tahunnya membuat adat istiadat tergerus akibat budaya asing yang dibawa oleh wisatawan. Dalam RIPARDA telah disinggung dengan jelas menjunjung tinggi adat Awig-Awig yang tiak hanya berlaku bagi pelaku pariwisata berkelanjutan namun juga bagi wisatawan yang datang ke NTB. Namun sosialisasi pemahaman menghargai budaya lokal dinilai kurang massif dan penegakan hukum yang kurang dan tidak konsisten

jika disbanding dengan destinasi tetangga yaitu Bali dimana dalam sustainable tourism juga telah dijelaskan akan pentingnya menjaga keaslian budaya lokal wilayah destinasi wisata.

4. Kekurangan program SREGIP dalam upaya membentuk jaringan ekonomi pengelolaan limbah padat tidak maksimal. Tidak dicantumkan secara eksklusif pada RIPARDA, sedikitnya lahan pembuangan sampah yang terorganisir serta semakin meningkatnya jumlah limbah padat setiap tahunnya menandakan kurangnya perhatian pemda pada sektor pengelolaan limbah sampah.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Keohane, Robert. (1984). *After hegemony: cooperation and discord in world political economy*. New jersey, USA

Morgenthau, H. (1962). *A political theory of foreign aid*. Chicago. University of Chicago.

Andrew F, Cooper. Jorge, Heine. Ramesh. (2017). *economic diplomacy, the oxford handbook of modern diplomacy*. Oxford: Oxford University Press.

Finn Trap. (2000). *Foreign aid and development: lesson learned for the future*. University of Copenhagen. Routledge. London and New York.

Lancaster, C. (2007). *Foreign aid, diplomacy, development and domestic politic*. Chicago. University of Chicago press.

K.J Holsti. (1988), Politik internasional, kerangka untuk analisis, jilid II. Terjemahan M Tahrir Azhari. Jakarta. Erlangga.

### Skripsi

Putra. Y. G. 2017. Bantuan luar negeri jerman ke sektor swasta di Indonesia: implementasi program local and regional economic development di nusa tenggara barat tahun 2011-2014. Malang. diakses pada Januari 18, 2021 dari <http://repository.ub.ac.id/4703/1/Putra%2C%20Yopa%20Gusti.pdf>

### Jurnal

Asiama, J. P. & Quartey (2009). *Foreign aid and the human development indicators in sub-sahara Africa*. *Journal of developing societies*, 25(1): 57-83. Doi 10.1177/0169796X0902500103

Bambang. (2015). Telaah *implementasi local economic development* di Jawa Tengah, 10(2). *Jurnal pembangunan ekonomi*. Diakses pada februari 08, 2021 dari <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/eko-regional/article/viewFile/743/776>

Finn, Tarp. (2006). *Aid and Development: Swedish Economic Policy Review*. 13(2). Diakses pada Februari 10, 2021 dari <https://www.government.se/49b739/contentassets/1466e8522c49410c83ea2052c347d804/finn-tarp-aid-and-development>

Norrsta E. (2016). *The rules of multi-stakeholder networks in planning organization change towards sustainable tourism: sustainable tourism in Lombok, Indonesia (Master)*. Journal sustainable business and innovation. Utrech University.

### **Web Pages**

BAPPENAS. (2015). Simreg bappenas: seri analisis pembangunan wilayah provinsi nusa tenggara barat. Diakses pada Januari 23, 2021 dari [https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/02.%20Analisis%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%202015\\_ok.pdf](https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/02.%20Analisis%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%202015_ok.pdf)

OECD. Definition and coverage. Diakses pada November 09, 2020, dari <http://www.oecd.org/development/financing-sustainabledevelopment/development-financestandards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm>

GIZ. (2018). Portal kerjasama Indonesia. Diakses pada Januari 28, 2021, dari <https://www.giz.de/en/worldwide/23079.html>

IFC. (2018). *Sustainable markets*. Diakses pada Februari 16, 2021 dari [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/news/sustainable-markets](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/news/sustainable-markets)

Bappenas. (2015). Penandatanganan MoU proyek NSLIC dan implementation agreement proyek SREGIP. Diakses pada Juni 09, 2021 dari <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers-/penandatanganan-mou-proyek-nslic-dan-implementation-agreement-proyek-sregip/>

Surat Keputusan Gubernur NTB. (2015). Penandatanganan perizinan an non perizinan di bidang penanaman modal. Pndelegasian sebagian kewenangan gubernur kepada kepala BKPM PTSP NTB nomor 503-484. Diakses pada Juli 29, 2021 melalui jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum provinsi NTB <http://jdih.ntbprov.go.id/>

AMC. (2017). SREGIP: *Resource efficiency and cleaner production in hotels in lombok*. Diakses pada Agustus 07, 2021 melalui <http://www.amcconsult.com/projects/sustainable-regional-economy-growth-and-investment-programme-sregip-resource-efficiency-and-cleaner-production-in-hotels-in-lombok>

BKPM. 2015. Kerjasama ekonomi antara Jerman dan Indonesia. Diakses pada 01 juni 2021 melalui <https://www.indonesia-frankfurt.de/ekonomi/kerjasama-ekonomi-antara-jerman-indonesia>

Kemenlu.2016. detail kerjasama bilateral Indonesia-Jerman. Diakses pada 01 Juni 2021 melalui <http://www.kemelu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=195>.

Kemenlu.2016. persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah republik federal Jerman mengenai kerjasama teknik tahun 2007. Diakses pada 01 juni 2021 melalui <http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/download/811>

Bappeda. 2015.NTB dalam angka 2015: dinas kebudayaan dan pariwisata NTB. Diakses pada Agustus 05, 2021 melalui <http://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka-2015/>

### **Laporan Resmi**

Asia Development Bank. (2010). Operasi Sektor Swasta ADB: Inovasi, Dampak, Integritas. Philippines. Diakses pada Januari 28, 2021 dari <https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/663/psod-brochure-id.pdf?sequence=6>

Heinrich, Merlina. Fernandes. (2017). *How donors can make the transition to strategic private sector engagement: programming innovations and organizational change*. Dced briefing note

World Bank. (2008). *The growth report: strategies for sustained growth and inklusif development*.

OECD (2006). *Promoting Pro-poor Growth: Private Sector Development*, OECD Publishing, Paris.

OECD. WTO. (2015). *Chapter 8: Deepening Private Sector Engagement in Aid for Trade*. OECD Library.

Lancaster, Nuamah, lieber, Jhonson. Todd. (2011). *Foreign aid and private sector development*. Watson University.

UNWTO. (2017). *Managing Growth and Sustainable Tourism Governance in Asia Pasific*. UNWTO publication. Griffith University

Jakartadiplo.2016. Jerman dan Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan dan kerjasama yang inovatif, Kedutaan besar republik federal Jerman Jakarta. Diakses pada 02 juni 2016 melalui <http://jakarta.diplo.de/contentblob/3392366/Daten/.../Forclime.pdf>.

SREGIP. 2017. *What is SREGIP? : Sustainable reginal economic growth investment programme*. Diakses pada Februari 08, 2021 melalui <https://adoc.pub/sregip-what-is-sregip.html>

Bappeda NTB. 2015. Rencana induk pariwisata berkelanjutan pulau Lombok 2015-2019. Diakses pada Maret 02, 2021 melalui <https://docplayer.info/30308181-Rencana-induk-pariwisata-berkelanjutan-pulau-lombok.html>